



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : ITJ-8.PW.01.02 Tahun 2024  
TENTANG

RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian perjanjian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk mempercepat capaian rencana aksi bidang administrasi terkait Inspektorat Jenderal, perlu dikeluarkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian

Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi.
  2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan.
  3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja dalam Lampiran Keputusan ini, adalah Rencana Aksi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta tambahan Rencana Aksi lainnya terkait percepatan Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Inspektorat Jenderal.
- KEEMPAT : Seluruh jajaran Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT melalui mekanisme, bahwa Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bagian dan Kelompok Fungsi):
1. mengisi data sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
  2. melampirkan Capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja dalam Laporan Triwulan (B03) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Triwulan (B03) masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2024

Inspektur Jenderal,



RAZILU  
NIP 196511281991031002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal.

RENCANA AKSI PERCAPAIAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN					PAGU (dalam ribuan rupiah)		RENCANA AKSI		KETERANGAN	
	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PERHITUNGAN (MANUAL/LIKU)	DASAR BUKTI / PEMENUHAN	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RANGKAI	PAGU	REALISASI (diisi oleh IT/realisasi dan sekretarier/realisasi)	KEGIATAN RENCANA AKSI		DATA DUKUNG
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL</b>											
1	SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah (Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)	SP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AXP Internal Kemerkumham  SP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur Dan Proses pada Keutuhan Penyelenggaraan SPDP  SP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko  SP WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi  SP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APJP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20  0.802  3.0  3.0  3.1	Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2021  Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.  Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.  Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.  Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.  Surat hasil evaluasi SPDP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP  Surat hasil evaluasi SPDP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP  Surat hasil evaluasi SPDP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI      Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Dukungan Manajemen dan Teknis ITJEN	1,194,471,000  691,595,000  1,178,357,000  21,967,347,000  1,568,485,600	Alokasi dari penuntasan alokas BK.1.1 (sopok nilai internal) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI  Alokasi dari penuntasan alokas BK.1.2 (komponen struktur dan proses SPDP terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI  Alokasi dari penuntasan alokas BK.1.3 (Manajemen Risiko) dalam SPDP Terintegrasi pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI  Alokasi dari penuntasan alokas BK.1.4 (Efektivitas pengendalian korupsi SPDP terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI  Alokasi dari anggaran KRO EBC, Layanan Manajemen SDM dan Sekretariat Inspektur Jenderal	0  0  0  0	tidak perlu diisri karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen	
<b>KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK (SEKRETARIAT ITJEN)</b>											
1	SP WA.5 SK 1569.1 Meningkatkan Kapabilitas APJP Kemerkumham	SK 1569.1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APJP Kementerian Hukum dan HAM	85%	(Jumlah Rencana peningkatan kapabilitas APJP yang dibekal/terjadi) <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan kapabilitas APJP <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi KAPP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. RO EBC-954 Layanan Manajemen SDM Internal	1,568,485,600	121,825,000	Fungsi SDM APARATUR Triwulan I Data pengelolaan Sumber Daya Manusia APJP, untuk data dukung KAPPI tersusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan Periode Triwulan-1  - Pembentukan Tim Kerja Kapabilitas APJP - Inventarisasi Rencana Aksi setiap elemen kapabilitas APJP - Pendampingan peningkatan kapabilitas APJP oleh BPKP - Terperuhnya Data dukung rencana aksi elemen pengelolaan SDM APJP - Pengisian Kertas Kerja Pendampingan Kapabilitas APJP terkait Profil SDM APJP, pembinaan BPKP, dan pengembangan SDM APJP - Update data profil SDM APJP pada website kapabilitas APJP Triwulan I	Fungsi SDM APARATUR Triwulan I - SK Tim Kerja Kapabilitas APJP - Dokumen kompilasi Rencana Aksi setiap elemen - Notula kegiatan pendampingan peningkatan kapabilitas APJP oleh BPKP - Laporan evaluasi evaluasi atas Analisis jabatan dan uraian jabatan pada Inspektur Jenderal Kemerkumham setiap tahun secara berkelanjutan - Laporan evaluasi identifikasi dan rekrutmen SDM - Surat permohonan keikutsertaan auditor ITJEN Kunham dalam kepengurusan AAPI - Laporan koordinasi dengan AAPI - Surat penyempulapan nama auditor untuk menjadi Tim Penyusun SAPSI - Laporan Evaluasi evaluasi atas sistem pengukuran kinerja APJP setiap tahun secara berkelanjutan - Update data Kertas Kerja Pendampingan Kapabilitas APJP terkait Profil SDM APJP, pembinaan BPKP, dan pengembangan SDM APJP - Update data profil APJP pada website kapabilitas APJP Triwulan I	Fungsi SDM Aparatur
									Triwulan I: BAGIAN PPL Data Pelaporan Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Inspektur Jenderal, untuk data dukung KAPPI tersusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggambarkan capaian kinerja yang telah dilakukan Periode Triwulan-1 meliputi : - Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Inspektur Jenderal tersusun memenuhi unsur akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggambarkan capaian kinerja yang telah dilakukan Periode Triwulan-2, meliputi : 1. Pemenuhan data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APJP masing-masing Elemen yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan 2. Pemenuhan atas Data Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APJP 3. Melakukan pengisian data Profil Kapabilitas APJP pada Laman <a href="https://apip.bpkp.go.id/newkappip/login">https://apip.bpkp.go.id/newkappip/login</a>	BAGIAN PPL 1. Data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APJP masing-masing Elemen dan pemenuhan Data Dukung pemenuhan atas PM Kapabilitas APJP yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan, meliputi : - Perubahan RENSTRA, - Manual BKU, - RENCANA, Data BELKIR Auto Adjustment, - Assessment RO, - RAKAL 2025, - Lapbu/Lapri - Manajemen Risiko, - Laporan SPDP Triwulan-1, 2. Update profil Kappi periode Triwulan-4 pada link <a href="http://apip.bpkp.go.id/newkappip">apip.bpkp.go.id/newkappip</a> (screenshot)	Bagian PPL
									FUNGSI HUMAS DAN SIP Data Pelaporan hasil pengawasan Internal/eksternal, publikasi hasil pengawasan, dan dukungan Teknologi Informasi Pengawasan Inspektur Jenderal tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan pada Periode Triwulan-1	FUNGSI HUMAS DAN SIP 1.Update Data Profil pengawasan KAPPI pada website KAPPI 2.Update Data Profil IT pada website KAPPI 3.Update Kertas Kerja Monitoring TL Pengawasan terkait Tindak Lanjut Temuan 4.Update Kertas Kerja bekal pencapaian akuntabilitas keuangan / Opini BPK 5.Update Kertas Kerja data koordinasi dengan APH	Fungsi Humas dan SIP
									FUNGSI PENGELOLA APBN Data pelaksanaan anggaran APJP, untuk data dukung KAPPI tersusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilakukan Periode Triwulan-1	FUNGSI PENGELOLA APBN 1.Update Data Profil Anggaran Realisasi 2.Data pelaksanaan anggaran	Fungsi Pengelola APBN
									Triwulan II: FUNGSI SDM 1. Inventarisasi Pemenuhan Data Dukung Rencana Aksi Kapabilitas APJP Setiap Elemen 2. Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APJP 3. Pengisian Data Profil SDM APJP Triwulan II	Triwulan II: FUNGSI SDM 1. Rekapitulasi data dukung rencana aksi setiap elemen 2. Surat Perintah Asesor Penilaian Mandiri Kapabilitas APJP 3. Update data profil SDM APJP pada website kapabilitas APJP Triwulan III	Fungsi SDM Aparatur
									Triwulan II: Bagian PPL Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Inspektur Jenderal tersusun memenuhi unsur akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggambarkan capaian kinerja yang telah dilakukan Periode Triwulan-2, meliputi : 1. Pemenuhan data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APJP masing-masing Elemen yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan 2. Pemenuhan atas Data Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APJP 3. Melakukan pengisian data Profil Kapabilitas APJP pada Laman <a href="https://apip.bpkp.go.id/newkappip/login">https://apip.bpkp.go.id/newkappip/login</a>	Triwulan II: BAGIAN PPL 1. Data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APJP masing-masing Elemen dan pemenuhan Data Dukung pemenuhan atas PM Kapabilitas APJP yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan, meliputi : - Laporan Triwulan Meeting, - UKRP ITJEN dan Sekretariat Itjen semester-1, - Lapbu/Lapri - Manajemen Risiko semester-1, - Laporan SPDP Triwulan-2, - Lap Infisar was semester-1 2.Update profil Kappi periode Triwulan-4 pada link <a href="http://apip.bpkp.go.id/newkappip">apip.bpkp.go.id/newkappip</a> (screenshot)	Bagian PPL
									FUNGSI HUMAS DAN SIP Data Pelaporan hasil pengawasan Internal/eksternal, publikasi hasil pengawasan, dan dukungan Teknologi Informasi Pengawasan Inspektur Jenderal tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan pada Periode Triwulan-2	FUNGSI HUMAS DAN SIP 1. Update Data Profil pengawasan KAPPI pada website KAPPI 2. Update Data Profil IT pada website KAPPI	Fungsi Humas dan SIP
									FUNGSI PENGELOLA APBN Data pelaksanaan anggaran APJP, untuk data dukung KAPPI tersusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilakukan Periode Triwulan-2	FUNGSI PENGELOLA APBN 1.Update Data Profil Anggaran Realisasi 2.Data pelaksanaan anggaran	Fungsi Pengelola APBN

									<p>0 Triwulan III: FUNGSI SDM 1. Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP oleh BPKP 2. Pengisian data profil SDM APiP pada aplikasi Kapabilitas APiP Triwulan III</p> <p>Triwulan III: Bagian PPL Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Jenderal terusun memenuhi unsur akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggambarkan capaian kinerja yang telah dilakukan Periode Triwulan-3, meliputi : 1. Pemenuhan data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APiP masing-masing Elemen yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan 2. Pemenuhan atas Data Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP 3. Melakukan pengisian data Profil Kapabilitas APiP pada Laman <a href="https://apip.btkp.go.id/newkapip/login">https://apip.btkp.go.id/newkapip/login</a></p> <p>FUNGSI HUMAS DAN SIP Data Pelaporan hasil pengawasan Internal/eksternal, publikasi hasil pengawasan, dan dukungan Teknologi Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal terusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diselesaikan pada Periode Triwulan-3</p> <p>FUNGSI PENGELOLA APBN Data pelaksanaan anggaran APiP, untuk data dukung KAPiP terusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilakukan Periode Triwulan-3</p> <p>0 Triwulan IV: FUNGSI SDM 1. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APiP 2. Pengisian data profil SDM APiP pada website Kapabilitas APiP Triwulan IV</p> <p>Triwulan IV: Bagian PPL Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Jenderal terusun memenuhi unsur akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggambarkan capaian kinerja yang telah dilakukan Periode Triwulan-4, meliputi : 1. Pemenuhan data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APiP masing-masing Elemen yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan 2. Pemenuhan atas Data Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP 3. Melakukan pengisian data Profil Kapabilitas APiP pada Laman <a href="https://apip.btkp.go.id/newkapip/login">https://apip.btkp.go.id/newkapip/login</a></p> <p>FUNGSI HUMAS DAN SIP Data Pelaporan hasil pengawasan Internal/eksternal, publikasi hasil pengawasan, dan dukungan Teknologi Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal terusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diselesaikan pada Periode Triwulan-4</p> <p>FUNGSI PENGELOLA APBN Data pelaksanaan anggaran APiP, untuk data dukung KAPiP terusun memenuhi unsur akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilakukan Periode Triwulan-4</p>	<p>Triwulan III: FUNGSI SDM 1. Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP 2. Pemohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP kepada BPKP 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab melaksanakan penilaian mandiri 4. Pengisian data profil SDM APiP pada aplikasi Kapabilitas APiP Triwulan III</p> <p>Triwulan III: Bagian PPL 1. Data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APiP masing-masing Elemen dan pemenuhan Data Dukung pemenuhan atas PH Kapabilitas APiP yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan, meliputi : - Postur Anggaran, - Lapbu/Lapri - Laporan SPiP Triwulan-3, 2. Update profil Kapip periode Triwulan-4 pada link <a href="https://apip.btkp.go.id/newkapip">apip.btkp.go.id/newkapip</a> (screenshot)</p> <p>FUNGSI HUMAS DAN SIP 1. Update Data Profil pengawasan KAPiP pada website KAPiP 2. Update Data Profil IT pada website KAPiP</p> <p>FUNGSI PENGELOLA APBN 1. Update Data Profil Anggaran Realisasi 2. Data pelaksanaan anggaran</p> <p>Triwulan IV: FUNGSI SDM 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kapabilitas APiP 2. Update data profil SDM APiP pada aplikasi Kapabilitas APiP triwulan IV</p> <p>Triwulan IV: Bagian PPL 1. Data dukung Tindak Lanjut atas AOI Kapabilitas APiP masing-masing Elemen dan pemenuhan Data Dukung pemenuhan atas PH Kapabilitas APiP yang menjadi Tugas dan Fungsi pada Bagian Program dan Pelaporan, meliputi : - Postur Anggaran, - BKWAS, - PKPT/PAU - DIPA Th. 2025, - LKIP Ijen dan Sekret 2024, - Lapbu/Lapri dan LAPTAH, - Penjelasan Risiko Semester-2, - Laporan SPiP triwulan-4, Laporan Mhistras Pengawasan Semester-2, 2. Update profil Kapip periode triwulan-4 pada link <a href="https://apip.btkp.go.id/newkapip">apip.btkp.go.id/newkapip</a> (screenshot)</p> <p>FUNGSI HUMAS DAN SIP 1. Update Data Profil pengawasan KAPiP pada website KAPiP 2. Update Data Profil IT pada website KAPiP</p> <p>FUNGSI PENGELOLA APBN 1. Update Data Profil Anggaran Realisasi 2. Data pelaksanaan anggaran</p>	<p>Fungsi SDM Aparatur</p> <p>Bagian PPL</p> <p>Fungsi Humas dan SIP</p> <p>Fungsi Pengelola APBN</p> <p>Fungsi SDM Aparatur</p> <p>Bagian PPL</p> <p>Fungsi Humas dan SIP</p> <p>Fungsi Pengelola APBN</p>	
2	SP WA.4 SK 1569.2	ESK 1569.2.1	100%	(Renaksi RB terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Rencana Aksi RB terkait Inspektorat Jenderal) DIBAGI 100%	Kepmerkumham RKT RB Th. 2024	1. Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Inspektorat Jenderal (kecuali RO EBC-954 Layanan Manajemen SDM Internal)	37,567,436,400	Alokasi dari seluruh anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	137,105,000	<p>Triwulan I: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Program dan Pelaporan terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Permukohman tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-1, meliputi : 1. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) 2. Pemenuhan RKT Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Periode Triwulan I yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Program dan Pelaporan telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen, laporan kegiatan, UANG, screenshot, dan bentuk dokumentasi kegiatan lainnya. 3. Koordinasi pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Upload data dukung pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. Melakukan tindaklanjuti hasil monev RKT RB periode Triwulan sebelumnya</p> <p>Triwulan II: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Program dan Pelaporan terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Permukohman tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-2, meliputi : 1. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) 2. Pemenuhan RKT Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Periode Triwulan II yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Program dan Pelaporan telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen, laporan kegiatan, UANG, screenshot, dan bentuk dokumentasi kegiatan lainnya. 3. Koordinasi pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Upload data dukung pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. Melakukan tindaklanjuti hasil monev RKT RB periode Triwulan sebelumnya</p> <p>Triwulan III: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Program dan Pelaporan terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Permukohman tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-3, meliputi : 1. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) 2. Pemenuhan RKT Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Periode Triwulan III yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Program dan Pelaporan telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen, laporan kegiatan, UANG, screenshot, dan bentuk dokumentasi kegiatan lainnya. 3. Koordinasi pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Upload data dukung pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. Melakukan tindaklanjuti hasil monev RKT RB periode Triwulan sebelumnya</p> <p>Triwulan IV: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Program dan Pelaporan terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Permukohman tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-4, meliputi : 1. Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) 2. Pemenuhan RKT Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Periode Triwulan IV yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Program dan Pelaporan telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen, laporan kegiatan, UANG, screenshot, dan bentuk dokumentasi kegiatan lainnya. 3. Koordinasi pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Upload data dukung pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. Melakukan tindaklanjuti hasil monev RKT RB periode Triwulan sebelumnya</p>	<p>1. Perjanjian Kinerja, Keptjian Renaksi Perjanjian Kinerja, 2. Dokumen penandatangan PK, dokumen UANG Monev PK (RAPM) Triwulan-1, 3. Laporan Monev PK (dengan data smrt dna eperformance) Triwulan-1, 4. Laporan TL atas Hasil Monev PK Triwulan-1, 5. Sosialisasi Perubahan Renstra dan Manual IKU Ijen Th. 2024 6. Sosialisasi RKT RB Ijen 7. Sosialisasi SPiP terintegrasi 8. Sosialisasi Renaksi Percepatan PK/Tarj 9. Pendampingan/bimbel penyusunan proses bisnis 10. Laporan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dipublikasi Triwulan-1 11. Laporan Monev atas hasil SPKP Triwulan-1, 12. Lap SPiP Triwulan-1, 13. Lap Monev survei 3 AS /SPKP Triwulan-4 th 2023 14. Laporan kegiatan Penyusunan RKT RB 15. Dokumen UANG atau Laporan Sosialisasi RKT RB 16. Nota Dinas pemohonan pemenuhan data dukung RKT RB di lingkungan Inspektorat Jenderal 17. Laporan Monev atas pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>1. UANG Monev PK (RAPM) Triwulan-2, 2. Laporan Monev PK (dengan data smrt dan eperformance) Triwulan-2, 3. Laporan Tindak lanjut atas Hasil Monev PK Triwulan-2 4. Laporan hasil Survei s Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dipublikasi Triwulan-2 5. Laporan Monev atas hasil SPKP Triwulan-2, 6. SK Tim SPiP terintegrasi, Asesor SPiP terintegrasi 7. workshop/sosialisasi /rapat SPiP 8. Laporan TL atas Rekomendasi SPiP terkait ITJEN, 9. Laporan SPiP Triwulan-1, 10. Laporan penerapan Inovasi, 11. Dokumen Manajemen Risiko, 12. IJKE SPiP Terintegrasi, 13. Laporan Pemantauan MB (CSA) smrt-1, 14. Laporan survei 3 AS /SPKP Triwulan-2, 15. Dokumen UANG atau Laporan Sosialisasi RKT RB 16. Nota Dinas pemohonan pemenuhan data dukung RKT RB di lingkungan Inspektorat Jenderal 17. Laporan Monev atas pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>1. UANG Monev PK (RAPM) Triwulan-3, 2. Laporan Monev PK (dengan data smrt dan eperformance) Triwulan-3, 3. Laporan TL atas Hasil Monev PK Triwulan-3 4. Laporan hasil Survei s Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dipublikasi Triwulan-3 5. Laporan Monev atas hasil SPKP Triwulan-3, 6. Laporan SPiP Triwulan-1, 7. Laporan SPiP Triwulan-3 8. Dokumen UANG atau Laporan Sosialisasi RKT RB 9. Nota Dinas pemohonan pemenuhan data dukung RKT RB di lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Laporan Monev atas pemenuhan RKT RB di Lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>1. UANG Monev PK (RAPM) Triwulan-4, 2. Laporan Monev PK (dengan data smrt dan eperformance) Triwulan-4, 3. Laporan TL atas Hasil Monev PK Triwulan-4, 4. pendampingan penyusunan PKPT/PAU 5. Laporan hasil Survei s Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dipublikasi Triwulan-4, 6. Laporan Monev atas hasil SPKP Triwulan-4, 7. Laporan SPiP Triwulan-4, 8. Laporan Pemantauan MB (CSA) smrt-2, 9. Laporan survei 3 AS /SPKP Triwulan-4 10. Dokumen UANG atau Laporan Sosialisasi RKT RB 11. Nota Dinas pemohonan pemenuhan data dukung RKT RB di lingkungan Inspektorat Jenderal</p>	<p>Bagian PPL</p> <p>Bagian PPL</p> <p>Bagian PPL</p> <p>Bagian PPL</p>

					4,271,551,218	Triwulan I: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Umum terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-1	1. Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik dengan lampiran pada aplikasi E-Arsip 2. Laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar aplikasi Srikandi 3. Laporan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Keasipan 4. SK tim pembinaan keasipan 5. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN		Bagian Umum
						Triwulan II: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Umum terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-2	- Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik dengan lampiran pada aplikasi E-Arsip - Laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar aplikasi Srikandi - Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan Unit Eselon I kepada Sekretaris Jenderal		Bagian Umum
						Triwulan III: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Umum terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-3	- Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik dengan lampiran pada aplikasi Humas dan E-Arsip - Laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar aplikasi Humas dan Srikandi - Laporan pelaksanaan pemeliharaan arsip fasilitatif/substantif - Laporan pelaksanaan pengawasan keasipan di lingkungan Kemennkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip - Laporan pelaksanaan tata kelola keasipan meliputi pengelolaan arsip aktif - Laporan pelaksanaan tata kelola keasipan meliputi pengelolaan arsip inaktif - Laporan pengawasan dan pengendalian BMN		Bagian Umum
						Triwulan IV: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Bagian Umum terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-4	1. Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik dengan lampiran pada aplikasi E-Arsip 2. Laporan pelaksanaan penggunaan arsip elektronik yang didalamnya memuat Pembuatan dan penerimaan arsip elektronik, Penyimpanan arsip elektronik, Deskripsi dan pengolahan arsip elektronik 3. Laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar aplikasi Srikandi 4. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola keasipan 5. Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan Unit Eselon I kepada Sekretaris Jenderal		Bagian Umum
						Triwulan I: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola SDM Aparatur terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-1	1. SK Tim Bertarung Kepentingan Inspektat Jenderal 2. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan 3. Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan telah ditindaklanjuti 4. Dokumen SKD (dasar data kepegawaian terbuta) 10 orang pegawai dan pejabat (secara berjenjang) yang dibebani dan ditandatangani oleh atasan langsung 5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi/Kepala LPT, pejabat struktural, sampai dengan 3F dan Pelaksanaan (sampling) terhadap pada penilaian kinerja SDM sesuai dengan struktur organisasi tahun 2023 6. Laporan sosialisasi pelaksanaan integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) (sesuai Tata Naskah Dinas) terkait Laporan AB tentang integritas dan Laporan Internalisasi Tata Nilai 7. Laporan AKTF Belajar 8. Dokumen reward dan punishment. (jika tidak terdapat reward/punishment maka dibuat surat keterangan ditandatangani oleh Sekretaris Jtjen)		Fungsi SDM
						Triwulan II: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola SDM Aparatur terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-2	1. Laporan Sosialisasi Bertarung Kepentingan 2. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan. 3. Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan telah ditindaklanjuti. 4. Laporan Monev Pengakuan Disiplin 5. Dokumen inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN 6. Laporan dan UANG Penyusunan Analisis Jabatan 7. Laporan AKTF Belajar 8. Dokumen reward dan punishment. (jika tidak terdapat reward/punishment maka dibuat surat keterangan ditandatangani oleh Sekretaris Jtjen)		Fungsi SDM
						Triwulan III: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola SDM Aparatur terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-3	1. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan. 2. Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan telah ditindaklanjuti. 3. Dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM APSP 4. Laporan penilaian mandiri kapabilitas APSP 5. Laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar (sesuai Tata Naskah Dinas) 6. Laporan AKTF Belajar 7. Dokumen reward dan punishment. (jika tidak terdapat reward/punishment maka dibuat surat keterangan ditandatangani oleh Sekretaris Jtjen)		Fungsi SDM
						Triwulan IV: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola SDM Aparatur terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-4	1. Laporan Implementasi Sistem Kerja dengan Model Fleksibel di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan. 3. Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Bertarung Kepentingan telah ditindaklanjuti. 4. Dokumen rencana aksi hasil laporan evaluasi kapabilitas APSP oleh BPKP 5. Laporan tindak lanjut atas rencana aksi hasil laporan evaluasi kapabilitas APSP oleh BPKP 6. Laporan monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin (sesuai Tata Naskah Dinas) 7. Laporan AKTF Belajar 8. Dokumen reward dan punishment. (jika tidak terdapat reward/punishment maka dibuat surat keterangan ditandatangani oleh Sekretaris Jtjen)		Fungsi SDM
					112,919,500	Triwulan I: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola APBN terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-1	1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Biro Keuangan terkait Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA.2023. 2. Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA.2024 (baru akan dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024).		Fungsi Pengelola APBN
						Triwulan II: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola APBN terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-2	1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Biro Keuangan terkait Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA.2023. 2. Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA.2024 3. Laporan SMART dan RKA Triwulan II		Fungsi Pengelola APBN
						Triwulan III: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola APBN terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-3	1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Biro Keuangan terkait Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA.2024. 2. Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan III AT.2024 3. Laporan SMART dan RKA Triwulan III		Fungsi Pengelola APBN
						Triwulan IV: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola APBN terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-4	1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Biro Keuangan terkait Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA.2024. 2. Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV T.2024 3. Laporan SMART dan RKA Triwulan IV		Fungsi Pengelola APBN
					119,715,921	Triwulan I: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Humas dan SIP terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukungan sesuai ketentuan Permennkumham tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-1	1. Capture aplikasi sesuai peta rencana SPBE 2. Dok publikasi DIPA (Biro Keuangan) (BO3) 3. Dok Publikasi Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja (Biro Perencanaan) (BO3) 4. Dok Publikasi LKJP (Biro Perencanaan) (BO3) 5. SK Kepala Satuan Kerja tgg Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 6. Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebarluasan informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik 7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID. 8. Laporan hasil monitoring dan evaluasi 9. Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial 10. SK Peluang Penanganan Pengaduan 11. Foto petugas/wangko/teknik khusus pengaduan 12. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, Twitter, Instagram, WA, Line) 13. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 14. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 15. Laporan Sosialisasi WBS, LPP, UPG, ISO, SHAP 16. Laporan kegiatan public campaign berupa pemasangan atau penyebarluasan		Fungsi Humas dan SIP

								<p>Triwulan II: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola Humas dan SIP terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Pemenuhan tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-2</p>	<p>1. Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebarluasan informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2. Laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/ banner) (sesuai Tata Naskah Dinas) 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID. 4. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi 5. Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial 6. SK Petugas Penanganan Pengaduan 7. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 8. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, Twitter, Instagram, WA, Line) 9. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 10. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja</p>		Fungsi Humas dan SIP
								<p>Triwulan III: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola Humas dan SIP terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Pemenuhan tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-3</p>	<p>1. Dok publikasi Renstra (Biro Perencanaan) (B09) jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat keterangan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebarluasan informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID. 4. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi 5. Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial 6. Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja untuk laporan tindak lanjut Semester 1 (sesuai Tata Naskah Dinas) 7. SK Petugas Penanganan Pengaduan 8. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 9. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, Twitter, Instagram, WA, Line) 10. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 11. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja</p>		Fungsi Humas dan SIP
								<p>Triwulan IV: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Fungsi Pengelola Humas dan SIP terlaksana kegiatan, terpenuhi data dukung sesuai ketentuan Pemenuhan tentang Reformasi Birokrasi Triwulan-4</p>	<p>1. Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPEE oleh Pusdatin (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebarluasan informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik 3. Laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/ banner) (sesuai Tata Naskah Dinas) 4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID. 5. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi 6. Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial 7. SK Petugas Penanganan Pengaduan 8. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 9. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, Twitter, Instagram, WA, Line) 10. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 11. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 12. Laporan Tindaklanjuti temuan APSP yang belum ditindaklanjuti 2 th terakhir di Ijèn</p>		Fungsi Humas dan SIP
SK 1569.2.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan	3.1	Cara menghitung dilakukan melalui survei yang dibangun dan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan	Surat laporan hasil survei dari BSK	1. Fasilitas pelaksanaan survey dari BSK 2. Menyusun laporan atas hasil survey	-		<p>Triwulan I: NIHL</p> <p>Triwulan II: NIHL</p> <p>Triwulan III: NIHL</p> <p>Triwulan IV: - Koordinasi dengan BSK untuk mengetahui jadwal pelaksanaan survei - Fasilitas pelaksanaan survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan kesekretariatan th 2024. - Menginformasikan hasil survei ke jajaran Ijèn melalui nodin Ses.Ijèn - Menyusun laporan money atas hasil survei</p>	<p>1. Laporan hasil survei layanan kesekretariatan dari BSK 2. Nota Dinas penyimpanan hasil survei layanan kesekretariatan kepada Internal Inspektorat Jenderal 3. Laporan monitoring dan evaluasi atas hasil survei layanan kesekretariatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal</p>		Bajian PPL	















RENCANA AKSI PERCAPAIAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN				PAGU (dalam ribuan rupiah)		REALISASI (dari alokasi total dan selisih per triwulan)	KEGIATAN RENCANA AKSI	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN (proses/selesai)	KETERANGAN	
	SABAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PERHITUNGAN (MUSKIM 2024)	DASAR BUKTI / PENDEKIHAN	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RANGKAI						PAGU
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL</b>												
1	SP WA 5.1	Nilai Apes. Evaluasi AKSP Internal Kementerian Reformasi Birokrasi terkait Peningkatan Intern Pemerintah (Perjanjian Kerja Inspektur Jenderal)	20	Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan Peraturan PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021.	Laporan hasil evaluasi SAKIP Kementerian KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1,194,471,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.1 evaluasi internal pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen			
	SP WA 5.2	Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Penyelenggaraan SPP	0,802	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	691,595,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.2 komponen struktur dan proses SPP terintegrasi pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
	SP WA 5.3	Indeks Manajemen Risiko	3,0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1,178,327,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.3 Manajemen Risiko Indeks SPP Terintegrasi pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
	SP WA 5.4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	21,967,347,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.4 efektivitas pengendalian korupsi SPP Terintegrasi pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
	SP WA 5.5	Nilai Kapabilitas APSP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1,568,485,600	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.5 Layanan Manajemen APSP pada Sekretariat Inspektur Jenderal	0				
<b>KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I</b>												
1	SP WA 5. SK 1563	Femujuhnya Penyelenggaraan SPP dan Evaluasi Internal AKSP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kemampuan Inspekturat Wilayah I (Perjanjian Kerja Inspektur Wilayah I)	90%	(Jumlah Renaksi Pembinaan terkait tercapainya pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKSP internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan Inspektur Wilayah I 100%	Laporan hasil evaluasi SAKIP KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	142,702,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.1 evaluasi internal pada Inspektur Wilayah I	0	Triwulan I: 1. Penetapan Evaluasi SAKIP dan Reviu LK; 2. Workshop Reviu LK; 3. Pendampingan (undangan dan Bro Perencanaan) 4. Pembinaan Tindaklanjut 5. Workshop FGD terkait AKSP Triwulan II: 1. Evaluasi AKSP tingkat Unit Eselon I 2. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi AKSP Mengan dan APSP Triwulan II; 3. Reviu Hasil Evaluasi Mandiri Kamwil Triwulan III: 1. Monitoring hasil reviu LK Kementerian 2. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi AKSP Mengan dan APSP Triwulan III Triwulan IV: 1. Monitoring Hasil Evaluasi AKSP Mengan dan APSP Triwulan IV 2. Reviu LK TA Kamwil Tahun 2024	1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Reviu LK; 2. Laporan Hasil Workshop Reviu LKSP; 3. Laporan Hasil Workshop Evaluasi AKSP; 4. Laporan Hasil Reviu LKSP TA KCI; 5. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKSP Mengan dan APSP Triwulan I Triwulan II: 1. Laporan Hasil Evaluasi AKSP tingkat Unit Eselon I; 2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II; 3. Laporan Hasil Reviu Hasil Evaluasi Mandiri Kamwil Triwulan III: 1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Reviu LK Kementerian; 2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKSP Mengan dan APSP Triwulan III Triwulan IV: 1. Laporan Hasil Monitoring atas hasil Evaluasi AKSP Triwulan IV 2. Laporan Reviu LK TA Kamwil tahun 2024		Inspekturat Wilayah I
	SK 1563.2	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP untuk komponen struktur dan proses pada Inspekturat Wilayah I	90%	(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP untuk komponen struktur dan proses yang dibekalkan oleh DIKLAGI Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP untuk komponen struktur dan proses) DIKLAGI 100%	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	513,704,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.2 peningkatan kualitas SPP pada Inspekturat Wilayah I	0	Triwulan I: 1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Monitoring Hasil Evaluasi SPP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I). Triwulan II: 1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPP 2024; 3. Monitoring Hasil Evaluasi SPP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II); 4. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPP 2024; 5. FGD Penjaminan Kualitas SPP Kementerian Tahun 2024. Triwulan III: Monitoring Hasil Evaluasi SPP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan III); Triwulan IV: 1. Pelaksanaan koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2024; 2. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi SPP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV); 3. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2022 dan 2023; Notasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2024.	1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hal Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Undangan dan notula rapat pembahasan Areas of Improvement hasil evaluasi maturitas SPP terintegrasi tahun 2023 bersama BPKP; Triwulan II: 1. Draft Pedoman Penjaminan Kualitas SPP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Laporan pelaksanaan penyusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kerangka Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPP 2024; 4. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjut rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPP Terintegrasi Kementerian (Triwulan II); 5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPP 2024; 6. Surat Perintah, Kerja Sama, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pemantauan telah dilakukan Penjaminan Kualitas SPP Kementerian Tahun 2024. Triwulan III: Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjut rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPP Terintegrasi Kementerian (Triwulan III); Triwulan IV: 1. Notula rapat koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2024; 2. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjut rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPP Terintegrasi Kementerian (Triwulan IV); 3. Surat Perintah, Berita Acara dan Laporan kegiatan Sosialisasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2022 dan 2023; 4. Berita Acara Pembahasan Notasi Hasil Evaluasi SPP Tahun 2024.		Inspekturat Wilayah I
	SK 1563.3	Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP untuk manajemen risiko di Inspekturat Wilayah I	90%	(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP untuk manajemen risiko) DIKLAGI 100%	Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi KEMKUMHAM yang diterbitkan oleh BPKP	232,182,000	Akses dan penyertaan dalam RI, 1.3 Pematuan Tindaklanjut terkait SPP (MR) yang diterbitkan oleh BPKP	0	Triwulan I: - Rapat masalah secara atas Rancangan Perencanaan terbagi MR, yang disampaikan Sekretariat Jenderal; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I). Triwulan II: - Rapat Pelaksanaan Evaluasi - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II). Triwulan III: - Evaluasi Penerapan MR - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III) Triwulan IV: - Penyusunan Laporan Komposisi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; (ITWIL III) - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).	1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi 2. Surat yang ditujukan kepada Eselon I terkait Tindaklanjut rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I). Triwulan II: 1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II). Triwulan III: 1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III). Triwulan IV: 1. Laporan Komposisi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).		Inspekturat Wilayah I

<p>RK 1563/4 Perintah tidak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan mutu atau penyelenggaraan SPK terkait efektifitas pengendalian konsep pada Inspektorat Wilayah I</p>	<p>90%</p>	<p>(jumlah Renaksi peningkatan mutu atau penyelenggaraan SPK terkait efektifitas pengendalian konsep) <b>DIBAGI</b> jumlah peningkatan mutu atau penyelenggaraan SPK terkait efektifitas pengendalian konsep) <b>DIKALI</b> 100%</p>	<p>Surat hasil evaluasi SPK Tematik di Kementerian HAM yang diterbitkan oleh SPK</p>	<p>1. Kegiatan Audit 2. Kegiatan Reviu (kecuali Reviu LK/DP) 3. Kegiatan Evaluasi (kecuali Evaluasi AKP dan PK SPK) 4. Pengiriman Lampir</p>	<p>3.116.707,000</p>	<p>Aspek dari seluruh kegiatan Inspektorat Wilayah I setelah diunggah hasil kegiatan atau kegiatan yang telah diunggah ke sistem informasi manajemen (SIM) Inspektorat Wilayah I</p>	<p><b>0. Triwulan I</b> 1. <b>Telaah Segway:</b> a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telaah Segway (TTWL I s.d. VI) b. Melaksanakan Rapat Penetapan tidak lanjut/revisi Telaah Segway tahun 2023 (TTWL I, II, IV) c. Penutupan pelaksanaan Telaah Segway tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024 d. Melaksanakan Rapat Penutupan Pelaksanaan Telaah Segway Internal ke-2 e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Telaah Segway f. Melaksanakan Penyusunan Konsep SP dan Proses SP g. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan h. Pelaksanaan Telaah Segway (TTWL I, IV, VI) di bulan Maret 2024 i. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut revisi Telaah Segway (TTWL I, III, V)  2. <b>Audit Kinerja Program:</b> Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (TTWL I s.d. VI) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)  3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Move RKT RB per twulan Kementerian b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  4. <b>Joint Audit Kinerja Program</b> Pelaksanaan dan Pelaporan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran - Penyusunan SK Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit Kinerja Program Pelaksanaan dan Pelaporan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran  5. <b>Reviu LK Semester II 2023</b> a. Koordinasi dengan Selgen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian. b. Menyelenggarakan Workshop c. Melaksanakan Reviu LK d. Menyusun CHR, LHR, dan Pernyataan Telaah Dievlu  6. <b>Reviu PABJ dan P3DN TW1</b> a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW1 c. Menyusun CHR dan LHR.  7. <b>Reviu PKP LK Tahun 2023</b> a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW1 c. Menyusun CHR, LHR, dan Pernyataan Telaah Dievlu  8. <b>Audit Kestatan Bangsa</b> a. Pelaksanaan dan persiapan pemenuhan data dukung b. Pelaksanaan Audit c. Pelaporan Audit  9. <b>Partisipasi Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBMM Tahun 2023</b> - Pembentukan Tim Penilai Internal Inspektorat Jendral - Forum One Discussion (FOD) Partisipasi Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBMM Tahun 2023  10. <b>Audit TK</b> a. <b>Pencapaian Audit TK</b> - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian terkait pelaksanaan Audit TK - Rapat Pembahasan Penemuan Objek Audit antara Ijen, Pustakan dan Seluruh Unit Eselon I - Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN - PK5 Audit TK oleh BRIN dan BSSN  11. <b>Pengawasan CASN dan Catur Pokok/Poleklim Tahun Anggaran 2024</b> a. <b>Pencapaian</b> - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jendral - Rapat Koordinasi seluruh tim Penawakan Inspektorat Wilayah - Pembentukan Tim Pengawasan CASN Tahun 2024 Inspektorat Jendral  12. <b>Data Integritas</b> a. <b>Monitoring rencana aksi Data Integritas</b>  13. <b>Evaluasi Renstra</b> a. <b>Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra</b> b. <b>Penyusunan Evaluasi Renstra</b>  14. <b>Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</b> Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024  15. <b>Audit Tujuan Tertentu (Phe Memory)</b>  16. <b>Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan mutu atau penyelenggaraan SPK terkait efektifitas pengendalian konsep pada Inspektorat Wilayah</b></p>	<p><b>1. Triwulan I</b> 1. <b>Telaah Segway:</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi</b> Rapat persiapan antar koordinator Telaah Segway (TTWL I s.d. VI) b. <b>Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi</b> Rapat Telaah Lanjut Revisi Telaah Segway tahun 2023 (Telaah Segway antara TTWL I, III, dan VI) c. <b>Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi</b> Telaah Segway tahun 2024 (Telaah Segway antara TTWL I, II, IV, dan VI) d. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundingan, SK</b> Narsumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Segway di lingkungan Inspektorat Jendral e. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi</b> rapat persiapan studi banding ke KLI dan Ijen (TTWL I s.d. VI)  2. <b>Audit Kinerja Program:</b> Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (TTWL I s.d. VI)  3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. <b>Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi</b> Pelaksanaan Move RKT RB per twulan Kementerian b. <b>Notula dan Dokumentasi</b> Foto: - Laporan Pelaksanaan Workshop RB; - Daftar Hadir; - Notula dan Dokumentasi Foto: - Laporan Pelaksanaan Workshop RB; c. <b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</b> dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi d. <b>Surat Permintaan Nama Evaluator</b> e. <b>Surat Permintaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</b> f. <b>Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</b> g. <b>Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</b> h. <b>Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</b>  4. <b>Joint Audit</b> a. <b>Notul Undangan Rapat</b> b. <b>Daftar Hadir</b> c. <b>Notul dan Dokumentasi</b> Foto; d. <b>SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dab Fungsi</b> Pemasaran;  5. <b>Reviu LK Semester II 2023</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi</b> terkait Koordinasi dengan Selgen b. <b>Laporan Kegiatan Workshop</b> c. <b>Dokumen reviu CHR, LHR dan Pernyataan</b> Telaah Dievlu  6. <b>Reviu PABJ dan P3DN TW1</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1 b. <b>Dokumen hasil reviu berupa CHR dan LHR</b>  7. <b>Reviu PKP</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1 b. <b>Dokumen hasil reviu berupa CHR, LHR dan Pernyataan</b> Telaah Dievlu  8. <b>Audit Kestatan Bangsa</b> a. <b>Dokumen</b> Program Kerja Audit b. <b>Surat Tugas Pelaksanaan Audit</b> c. <b>Dokumen</b> Laporan Hasil Audit  9. <b>Partisipasi Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBMM Tahun 2024</b> - <b>SK Tim Penilai Internal Inspektorat Jendral</b> - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Forum Grup Discussion (FGD) Partisipasi Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBMM Tahun 2024  10. <b>Audit TK</b> a. <b>Pencapaian Audit TK</b> - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Rapat Koordinasi Tim Internal - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian terkait pelaksanaan Audit TK - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Rapat Pembahasan Penemuan Objek Audit antara Ijen, Pustakan dan Seluruh Unit Eselon I - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait PK5 Audit TK oleh BRIN dan BSSN  11. <b>Pengawasan CASN dan Catur Pokok/Poleklim Tahun Anggaran 2024</b> a. <b>Pencapaian</b> - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> Rapat Koordinasi Tim Internal - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jendral - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Rapat Pembahasan Penemuan Objek Audit antara Ijen, Pustakan dan Seluruh Unit Eselon I - <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait PABJ Audit TK oleh BRIN dan BSSN  12. <b>Data Integritas</b> a. <b>Laporan</b> Monitoring rencana aksi Data Integritas  13. <b>Evaluasi Renstra</b> a. <b>Notul</b> rapat dan <b>Surat Keputusan</b> Tim Koordinator Reviu Renstra b. <b>Notul</b> rapat persiapan Reviu Renstra  14. <b>Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</b>  15. <b>Laporan Audit Tujuan Tertentu (Phe Memory)</b>  16. <b>Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan mutu atau penyelenggaraan SPK terkait efektifitas pengendalian konsep pada inspektorat Wilayah</b></p>	<p>Inspektorat Wilayah I</p>
						<p><b>1. Triwulan II</b> 1. <b>Telaah Segway:</b> a. <b>Penyusunan Laporan Telaah Segway Tahun 2024</b> oleh TTWL II, IV, VI b. <b>Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Revisi Telaah Segway Tahun 2023</b> oleh TTWL I, III, V c. <b>Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Segway di lingkungan Inspektorat Jendral</b> d. <b>Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke KLI dan Ijen (TTWL I s.d. VI)</b>  2. <b>Audit Kinerja Program:</b> Melaksanakan rapat persiapan Audit Program (TTWL I s.d. VI) (tentative/BNBR) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)  3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. <b>Rapat</b> Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 b. <b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06</b> dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi c. <b>Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB</b> pada Kantor Wilayah Unit Pelaksana Teknis d. <b>Penyusunan Draft Penetapan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan</b> Kementerian Hukum dan HAM  4. <b>Joint Audit Kinerja Layanan Pemasaran</b> Pelaksanaan Joint Audit Program Pelaksanaan dan Pelaporan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran  5. <b>Reviu RKAKL Pagu Indefinit Tahun 2025</b> a. <b>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I</b> terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Indefinit Tahun 2025 b. <b>Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Indefinit Tahun 2025</b> c. <b>Menyusun CHR dan LHR</b>  6. <b>Reviu PABJ dan P3DN TW2</b> a. <b>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I</b> terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW2. b. <b>Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW2</b> c. <b>Menyusun CHR dan LHR</b>  7. <b>Evaluasi WBK / WBMM</b> a. <b>Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</b> - <b>Workshop</b> persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM b. <b>Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI</b> menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - <b>Rapat TPI</b> c. <b>Partisipasi Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</b> - <b>Pembentukan</b> Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpedoman Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jendral - <b>Pengiriman</b> nilai satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMP2 Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMP2 Merpan RB  8. <b>Audit TK</b> Pelaksanaan Audit TK, Aplikasi dan Infrastruktur  9. <b>Audit Kinerja dan Keagasan Satter Luar Negeri</b> Pelaksanaan Audit  10. <b>Pengawasan CASN dan Catur Pokok/Poleklim Tahun Anggaran 2024</b> a. <b>Pelaksanaan Pengawasan CPNS</b> b. <b>Pengawasan Tahap Pencapaian</b> c. <b>Pengawasan Pengabdian CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</b> d. <b>Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</b> e. <b>Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</b></p>	<p><b>1. Triwulan II</b> 1. <b>Telaah Segway:</b> a. <b>Laporan</b> Telaah Segway Tahun 2024 oleh TTWL II, IV, VI b. <b>Laporan Tindak Lanjut Telaah Segway Tahun 2023</b> oleh TTWL I, III, V c. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundingan, SK</b> Narsumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Segway di lingkungan Inspektorat Jendral d. <b>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi</b> rapat persiapan studi banding ke KLI dan Ijen (TTWL I s.d. VI)  2. <b>Audit Kinerja Program:</b> Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (TTWL I s.d. VI)  3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. <b>Rapat</b> Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 b. <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> Foto: - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi - <b>Notul</b> Pemenuhan Nama Evaluator - <b>Surat</b> Permintaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - <b>Berita</b> Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - <b>Laporan</b> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - <b>Informasi</b> Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06  4. <b>Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB</b> pada Kantor Wilayah Unit Pelaksana Teknis Rapat Persiapan Undangan Absensi Notula dan Dokumentasi Foto Pelaksanaan Surat Permintaan Kertas Kerja Wawancara; Laporan Pelaksanaan  5. <b>Reviu RKAKL Pagu Indefinit Tahun 2025</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Indefinit Tahun 2025 b. <b>Dokumen hasil CHR dan LHR</b>  6. <b>Reviu PABJ dan P3DN TW2</b> a. <b>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi</b> terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW2</p>		

- Pelaksanaan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang
- Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir
- Pengawasan Tahap Pengawasan CPNS
- b. Pelaksanaan Pengawasan PKK
  - Pengawasan Tahap Penencanaan
  - Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran
  - Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi
  - Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara
  - Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
  - Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi
  - Pengangkatan Tahap P3K
- c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Pokok/Pokokan
  - Pengawasan Tahap Pribadi
  - Pengawasan Tahap SKD
  - Pengawasan Tahap Kesehatan
  - Pengawasan Tahap Kesamapaian
  - Pengawasan Tahap WPKK
- 11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
  - Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
- 12. Audit PNPB
  - Periapan perencanaan audit PNPB
- 13. Duta Integritas
  - a. Revisi Kaproterkum tentang Pembangunan Integritas
  - b. Monitoring rencana aksi Duta Integritas
- 14. Evaluasi Renstra
  - a. Penyusunan PKE, KKE dan format LHE Renstra
- 15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional
  - Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024
- 16. Audit Tajan Terentu (Pte Memory)
- 17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektivitas pengendalian konsep pada Inspektori Wilayah

- TW2,
- b. Dokumen CHR dan LHR.
- 7. Evaluasi WBK / WBKM
  - a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM Tahun 2024
    - Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBKM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:
      - 1) Undangan
      - 2) Absen
      - 3) Notula
      - 4) Dokumentasi
    - Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBKM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:
      - 1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBKM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
      - 2) BA Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
      - 3) Laporan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBKM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
      - 4) Panel TPI, dengan data dukung sebagai berikut:
        - 1) Surat Perintah TPI
        - 2) Laporan Panel TPI
        - 3) Surat Informasi Hasil Panel ke Setjen
      - 5) Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM Tahun 2024
    - b. Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpedukal Menuju WBK/WBKM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui Sekretaris Jenderal, dengan data dukung sebagai berikut:
      - 1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpedukal Menuju WBK/WBKM Tahun 2024
      - 2) Surat Penetapan Satuan Kerja Berpedukal Menuju WBK/WBKM Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM
      - 3) Pengutipan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBKM pada Aplikasi PMP2D Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMP2D Mengajar RB, dengan data dukung sebagai berikut:
        - 1) Surat Perintah Pengutipan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBKM
        - 2) Laporan Pengutipan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBKM
  - 8. Audit TIK
    - Surat Perintah Pelaksanaan Audit TIK Aplikasi dan Infrastruktur
    - Laporan Hasil Audit TIK Aplikasi dan Infrastruktur
    - 9. Audit Kinerja dan Keuangan Sektor Luar Negeri
      - Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN
      - Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN
    - 10. Pengawasan CADM dan Catur Pokok/Pokokan Tahun Anggaran 2024
      - a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS
        - Laporan Pengawasan Tahap Penencanaan
        - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran
        - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi
        - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar
        - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang
        - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir
        - Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS
      - b. Pelaksanaan Pengawasan PKK
        - Laporan Pengawasan Tahap Penencanaan
        - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran
        - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi
        - Laporan Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara
        - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
        - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi
        - Laporan Pengangkatan Tahap P3K
      - c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Pokok/Pokokan
        - Laporan Pengawasan Tahap Pribadi
        - Laporan Pengawasan Tahap SKD
        - Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan
        - Laporan Pengawasan Tahap Kesamapaian
        - Laporan Pengawasan Tahap WPKK
    - 11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
      - Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
    - 12. Audit PNPB Triwulan II
      - a. Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB
      - b. Notula hasil rapat
    - 13. Duta Integritas
      - a. Draft Revisi Kementerkum tentang Pembangunan Integritas
      - b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas
    - 14. Evaluasi Renstra
      - a. Notulan rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra
    - 15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024
    - 16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektivitas pengendalian konsep pada Inspektori Wilayah

- Triwulan III
- 1. Tabah Segawat:
  - a. Melaksanakan studi banding ke K/L lain
  - b. Menyampaikan laporan Tabah Segawat Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APPJ IT2IN
- 2. Audit Kinerja Program
  - a. Melaksanakan Workshop (tentative/ PNPB)
  - b. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja
  - c. Melaksanakan Penyusunan Konsep Surat Perintah
  - d. Melaksanakan Audit Program pada masing masing Unit Eselon I (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)
- 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi
  - a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09
  - b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi
- 4. Revisi LK Semester I 2024
  - a. Koordinasi dengan Setjen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.
  - b. Menyenggarakan Workshop
  - c. Melaksanakan Revisi LK
  - d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi
- 5. Revisi PAFBI dan P3DN TW3
  - a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PAFBI dan P3DN TW3.
  - b. Melaksanakan Revisi PAFBI dan P3DN TW3
  - c. Menyusun CHR dan LHR
- 6. Revisi RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025
  - a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025
  - b. Melaksanakan Revisi RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025
  - c. Menyusun CHR dan LHR
- 7. Revisi RK-BNN Tahun 2025
  - a. Koordinasi dengan Setjen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.
  - b. Melaksanakan Revisi LK
  - c. Menyusun CHR dan LHR
- 8. Monitoring WBKM 2 Tahun
  - Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja yang Sudah Mendapatkan Predikat WBKM setiap 2 tahun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 9. Audit TIK
  - Pelaporan kompiasi Audit TIK
- 10. Audit Kinerja dan Keuangan Sektor Luar Negeri
  - Penyusunan laporan kompiasi
- 11. Pengawasan CADM dan Catur Pokok/Pokokan Tahun Anggaran 2024
  - Penyusunan Laporan Kompiasi
- 12. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
  - Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
- 13. Audit PNPB

- Triwulan III
- 1. Tabah Segawat:
  - a. Surat permohonan ke K/L lain, laporan dan dokumentasi studi banding ke K/L lain
  - b. Nota Dinas penyesuaian Laporan Tabah Segawat Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APPJ IT2IN
- 2. Audit Kinerja Program
  - a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program pada Unit Eselon I, Laporan Kegiatan
  - b. Program Kerja
  - c. Surat Perintah
  - d. LHR Program pada masing2 ITWIL ( ITWIL I s.d. VI )
- 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi
  - a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09
  - Undangan
  - Absensi
  - Notula dan Dokumentasi Foto
  - b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi
  - Notul Permintaran Nama Evaluator;
  - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;
  - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;
  - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;
  - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09.
- 4. Revisi LK Semester I 2024
  - a. UANG terkait koordinasi dengan Setjen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.
  - b. Laporan kegiatan Workshop
  - c. Dokumen CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi
- 5. Revisi PAFBI dan P3DN TW3
  - a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PAFBI dan P3DN TW3.
  - b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR
- 6. Revisi RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025
  - a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025
  - b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR
- 7. Revisi RK-BNN Tahun 2025
  - a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Setjen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.
  - b. Dokumen CHR dan LHR
- 8. Monitoring WBKM 2 Tahun
  - Surat Perintah Monitoring Satuan Kerja yang Sudah Mendapatkan Predikat WBKM 2 Tahun
  - BA Money Satuan Kerja yang Sudah Mendapatkan Predikat WBKM 2 Tahun
  - Laporan Money Satuan Kerja yang Sudah Mendapatkan Predikat WBKM 2 Tahun
  - Surat Informasi ke Karwil Kementerian Hukum dan HAM yang Satuan Kerja yang Sudah Mendapatkan Predikat WBKM 2 Tahun
  - Laporan Kompiasi ke Menpan terkait Satuan Kerja yang dilakukan Money Sudah Mendapatkan Predikat 2 Tahun
- 9. Audit TIK
  - Laporan Kompiasi Pelaksanaan Audit TIK

	<p>14. Data Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>17. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Setter Luar Negeri</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Calon Penerima/Penerima Tahun Anggaran 2024</p> <p>12. Audit PNPB</p> <p>13. Data Integritas</p> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <p>15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>16. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p>	
	<p>Tindakan IV</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Revisi PAPIJ dan PIDN TW4</p> <p>5. Revisi LK TW3 TA 2024</p> <p>6. Revisi RKAKL Pagu Alokasi Tahun 2025</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBKM</p> <p>8. Audit PNPB</p> <p>9. Duta Integritas</p> <p>10. Evaluasi Renstra</p> <p>11. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>12. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>13. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>1. Telah Selesai:</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12</p> <p>5. Revisi LK TW3 TA 2024</p> <p>6. Revisi RKAKL Pagu Alokasi Tahun 2025</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBKM</p> <p>8. Audit PNPB</p> <p>9. Duta Integritas</p> <p>10. Evaluasi Renstra</p> <p>11. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>12. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>13. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	



RENCANA AKSI PERCAPAIAN CAPAIAN PERJANTAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RANGKAI	PAGU (dalam ribuan rupiah)	REALISASI (ditulis oleh tim dan sekret per triwulan)	KEGIATAN RENCANA AKSI	RENCANA AKSI	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN (proses/selesai)	KETERANGAN
				PERHITUNGAN (MANUAL IKU)	DASAR BUKTI / PEMENUHAN								
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL</b>													
1	SP WA 5 Memperkuat Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah (Perjarjian Kinerja Inspektur Jenderal)	ESK WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021	Laporan hasil evaluasi SAKIP KementerianHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	1,194,471,000	Akasi dari penjumlahan nilai SAKIP (evaluasi internal) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen			
		ESK WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPSP	0.802	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPSP Terintegrasi KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP		691,595,000	Akasi dari penjumlahan nilai BK 1.7 (kemampuan struktur dan proses SPSP terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
		ESK WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko	3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPSP Terintegrasi KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP		1,178,357,000	Akasi dari penjumlahan nilai BK 1.5 (kemampuan Manajemen Risiko) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
		ESK WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPSP Terintegrasi KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP		21,967,347,000	Akasi dari penjumlahan nilai BK 1.4 (efektivitas pengendalian korupsi SPSP terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0				
		ESK WA 5.5 Nilai Kapabilitas APSP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.1	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021	Surat hasil evaluasi KAPSP KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Dukungan Manajemen dan Telisn ITJEN	1,568,485,600	Akasi dari anggaran KPIK (Layanan Manajemen SDM) pada Sekretariat Inspektur Jenderal	0				
<b>KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH II</b>													
1	SP WA 5 SK 1564 Terwujudnya Penyelenggaraan SPSP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektur Wilayah II	ESK 1564.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan Inspektur Wilayah II	90%	(Jumlah Renaski RB terkait evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaski RB terkait evaluasi AKIP <b>DIKALI</b> 100%)	Laporan hasil evaluasi SAKIP KementerianHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1. Evaluasi AKIP 2. Reviu LKIP 3. Pendampingan (undangan dari Biro Perencanaan) 4. Pemantauan Tindaklanjuti 5. Workshop FGD terkait AKIP	40,010,000	Akasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKIP pada Inspektur Wilayah II	0	Triwulan I: 1. Persiapan Evaluasi SAKIP dan Reviu LKIP; 2. - Workshop Reviu LKIP - - Workshop Evaluasi SAKIP; 3. Reviu LKIP TK KL; 4. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan I  Triwulan II: 1. Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I 2. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan II  Triwulan III: 1. Monitoring hasil Reviu LKIP Kementerian 2. Pelaksanaan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan III  Triwulan IV: 1. Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan IV	Triwulan I: 1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Reviu LKIP; 2. - Laporan Hasil Workshop Reviu LKIP; - Laporan Hasil Workshop Evaluasi AKIP; 3. Laporan Hasil Reviu LKIP TK KL; 4. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan I  Triwulan II: 1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I; 2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II;  Triwulan III: 1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut hasil Reviu LKIP Kementerian; 2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan III  Triwulan IV: 1. Laporan Hasil Monitoring atas hasil Evaluasi AKIP Triwulan IV		Inspektur Wilayah II
		ESK 1564.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPSP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah II	90%	(Jumlah Renaski peningkatan maturitas penyelenggaraan SPSP untuk komponen struktur dan proses) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPSP Terintegrasi KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pendampingan Pengaturan SPSP 2. Penjaminan Kualitas Maturitas SPSP 3. Pemantauan Tindaklanjuti 4. Workshop FGD terkait SPSP (Stasiun)	52,822,000	Akasi dari anggaran kegiatan Pendampingan/evaluasi/pemantauan kualitas SPSP pada Inspektur Wilayah II	0	Triwulan I: 1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPSP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Monitoring Hasil Evaluasi SPSP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I).  Triwulan II: 1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPSP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPSP 2024; 3. Monitoring Hasil Evaluasi SPSP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II); 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPSP 2024; 5. FGD Penjaminan Kualitas SPSP Kementerian Tahun 2024.  Triwulan III: Monitoring Hasil Evaluasi SPSP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan III);  Triwulan IV: 1. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2024; 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi SPSP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV); 3. Melaksanakan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2022 dan 2023 serta Notasi Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2024.	Triwulan I: 1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan pelaksanaan persusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPSP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kertas Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPSP 2024; 4. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPSP Terintegrasi Kementerian (Triwulan II); 5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPSP 2024; 6. Surat Perintah, Kertas Kerja, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan telah Dilakukan Penjaminan Kualitas SPSP Kementerian Tahun 2024.  Triwulan II: Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPSP Terintegrasi Kementerian (Triwulan II);  Triwulan IV: 1. Notula rapat koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2024; 2. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPSP Terintegrasi Kementerian (Triwulan IV); 3. Surat Perintah, Berita Acara dan Laporan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2022 dan 2023; 4. Berita Acara Pembahasan Notasi Hasil Evaluasi SPSP Tahun 2024.		Inspektur Wilayah II
		ESK 1564.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPSP terkait manajemen risiko di Inspektur Wilayah II	90%	(Jumlah Renaski peningkatan maturitas penyelenggaraan SPSP terkait Manajemen Risiko) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPSP Terintegrasi KementerianHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pemantauan Tindaklanjuti 2. Workshop/FGD terkait SPSP (MR) 3. Pendampingan Penyusunan/ Penerapan Manajemen Risiko 4. Evaluasi Manajemen Risiko	93,737,000	Akasi dari anggaran kegiatan Pendampingan/ Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektur Wilayah II	0	Triwulan I: - Rapat masukan saran atas Rancangan Permenkumham tentang MR yang disampaikan Sekretariat Jenderal; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).  Triwulan II: - Rapat Pelaksanaan Evaluasi; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).  Triwulan III: - Evaluasi Penerapan MR; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III)  Triwulan IV: 1. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).	Triwulan I: 1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).  Triwulan II: 1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).  Triwulan III: 1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III);  Triwulan IV: 1. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPSP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).		Inspektur Wilayah II

<p>ISK 1564.4</p> <p>Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II</p>	<p>90%</p> <p>Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II</p> <p><b>DIKALI 100%</b></p>	<p>Surat hasil evaluasi SPP Tertinggi Kementerian yang diterbitkan oleh BPK</p>	<p>1. Kegiatan Audit 2. Kegiatan Revisi (kecuali Revisi LK/PP) 3. Kegiatan Evaluasi (kecuali Evaluasi AKIP dan PK SPP) 4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>3,818,726,000</p> <p>Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah II setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi S&amp;A/Revisi LK/PP dan Kegiatan Pendampingan evaluasi perjam</p>	<p><b>Triwulan I</b></p> <p>1. Telaah Sejawat: a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan Rapat Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (ITWIL I, III, V)</p> <p>2. <b>Audi Kinerja Program:</b> Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (Cat: Audi Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audi pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Movev RKT RB per triwulan Kementerian b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. <b>Joint Audi Kinerja Program</b> Pemegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Penyusunan SK, Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kerjasama Joint Audi Kinerja Program Pemegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>5. Revisi LK Semester II 2023 a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian b. Menyelenggarakan Workshop c. Melaksanakan Revisi LK d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi</p> <p>6. Revisi PABJ dan PSDN TW1 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW1 b. Melaksanakan Revisi PABJ dan PSDN TW1 c. Menyusun CHR dan LHR.</p> <p>7. Revisi PKP LK Tahun 2023 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW1 b. Melaksanakan Revisi PABJ dan PSDN TW1 c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi.</p> <p>8. <b>Audi Ketaatan Barjas</b> a. Perencanaan dan persiapan pemenuhan data dukung b. Pelaksanaan Audit c. Pelaporan Audit</p> <p>9. <b>Persiapan Evaluasi</b> Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 - Pembentukan Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal - Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023</p> <p>10. <b>Audit TK</b> a. Perencanaan Audit TK - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK - Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pustadin dan Seluruh Unit Eselon I - Koordinasi SPBE dengan BRN dan BSSN - PKG Audit TK oleh BRN dan BSSN</p> <p>11. <b>Pengawasan CASN dan Catur Potekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024</b> a. Perencanaan - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Rapat Koordinasi seluruh tim Penwalkan Inspektorat Wilayah - Pembentukan Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektorat Jenderal</p> <p>12. <b>Duta Integritas</b> a. Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>13. <b>Evaluasi Renstra</b> a. Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra b. Persiapan Evaluasi Renstra</p> <p>14. <b>Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</b> Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024</p> <p>15. <b>Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</b></p> <p>16. <b>Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</b></p>	<p><b>Triwulan I</b></p> <p>1. Telaah Sejawat: a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (Telaah Sejawat antara ITWIL I, III, dan VI) c. Nota Dinas dan Surat Perintah Telaah Sejawat tahun 2024 (Telaah Sejawat antara ITWIL II, IV, dan VI) d. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaahan Sejawat Internal ke-2 Program Kerja Telaahan Sejawat e. Nota Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan Telaah Sejawat f. Surat Permintaan Dasar Dokumen</p> <p>2. <b>Audi Kinerja Program:</b> Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. <b>Reformasi Birokrasi</b> a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Movev RKT RB per triwulan Kementerian - Nodin Undangan Peserta Workshop RB - Daftar Hadir - Notula dan Dokumentasi Foto - Laporan Pelaksanaan Workshop RB</p> <p>4. <b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03</p> <p>5. <b>Joint Audit</b> a. Nodin Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi Foto d. SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan</p> <p>6. <b>Revisi LK Semester II 2023</b> a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen b. Laporan Kegiatan Workshop c. Dokumen revisi CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi</p> <p>7. <b>Revisi PABJ dan PSDN TW1</b> a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW1 b. Dokumen hasil revisi berupa CHR dan LHR.</p> <p>8. <b>Revisi PKP</b> a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW1 b. Dokumen hasil revisi berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi.</p> <p>9. <b>Audi Ketaatan Barjas</b> a. Dokumen Program Kerja Audit b. Surat Tugas Pelaksanaan Audit c. Dokumen Laporan Hasil Audit</p> <p>10. <b>Persiapan Evaluasi</b> Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024 - SK Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024</p> <p>11. <b>Audit TK</b> a. Perencanaan Audit TK - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi Tim Internal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pustadin dan Seluruh Unit Eselon I - Notula dan Dokumentasi hasil Koordinasi SPBE dengan BRN dan BSSN - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait PKG Audit TK oleh BRN dan BSSN</p> <p>12. <b>Pengawasan CASN dan Catur Potekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024</b> a. Perencanaan - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Internal - Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi seluruh tim Penwalkan Inspektorat Wilayah - Surat Perintah Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektorat Jenderal</p> <p>13. <b>Duta Integritas</b> Laporan Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>14. <b>Evaluasi Renstra</b> a. Notulen rapat dan Surat Keputusan Tim Koordinator Revisi Renstra b. Notulen rapat persiapan Revisi Renstra</p> <p>15. <b>Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</b></p> <p>16. <b>Laporan Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</b></p> <p>17. <b>Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</b></p>	<p>Inspektorat Wilayah II</p>
					<p><b>Triwulan II</b></p> <p>1. Telaah Sejawat: a. Penyusunan Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektorat Jenderal d. Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>2. <b>Audi Kinerja Program:</b> a. Melaksanakan rapat persiapan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan rapat persiapan workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) tentative (PNBP)</p> <p>3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Peleaksan Teknis d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>4. <b>Joint Audi Kinerja Layanan Pemasyarakatan</b> Pelaksanaan Joint Audi Program Pemegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>5. <b>Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</b> a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th</p>	<p><b>Triwulan II</b></p> <p>1. Telaah Sejawat: a. Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Laporan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektorat Jenderal d. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>2. <b>Audi Kinerja Program:</b> a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. <b>Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 - Undangan - Absensi - Notula dan Dokumentasi Foto</p> <p>4. <b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> - Nodin Pemantauan Nama Evaluator - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06</p> <p>5. <b>Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Peleaksan Teknis</b> - Undangan - Notula dan Dokumentasi Foto</p>	

<p>2025</p> <p>b. Melaksanakan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Revisi PABJ dan P3DN TW2</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan P3DN TW2</p> <p>b. Melaksanakan Revisi PABJ dan P3DN TW2</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Panel TPI</li> </ul> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempilapan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal</li> <li>- Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Menpan RB</li> </ul> <p>8. Audit TK</p> <p>- Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</p> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saliter Luar Negeri Pelaksanaan Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Notula dan Dokumentasi Foto Pelaksanaan</li> <li>- Surat Perintah</li> <li>- Kertas Kerja Wawancara</li> <li>- Laporan Pelaksanaan</li> </ul> <p>4. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Draft Peraturan Ijen tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul> <p>4. Joint Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampling</li> <li>a. Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit</li> <li>b. Surat Perintah Pengujian KKA dan PKA</li> <li>c. Laporan Hasil Pengujian KKA dan PKA</li> </ul> <p>- Pelaksanaan</p> <p>c. Surat Perintah</p> <p>d. Laporan Hasil Audit Joint Audit</p> <p>e. Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Joint Audit</p> <p>5. Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</li> <li>b. Dokumen hasil CHR dan LHR</li> </ul> <p>6. Revisi PABJ dan P3DN TW2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan P3DN TW2</li> <li>b. Dokumen CHR dan LHR</li> </ul> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Undangan</li> <li>2) Absen</li> <li>3) Notula</li> <li>4) Dokumentasi</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2) BA Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>3) Laporan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Panel TPI, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Panel TPI</li> <li>2) Laporan Panel TPI</li> <li>3) Surat Informasi Hasil Panel ke Setjen</li> </ul> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempilapan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</li> <li>2) Surat Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM</li> <li>- Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Menpan RB, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> <li>2) Laporan Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> </ul> <p>8. Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> <li>- Laporan Hasil Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> </ul> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saliter Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekin Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</li> <li>- Notula hasil rapat</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>
<p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekin Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan perencanaan audit PNPB</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan PKE, KKE dan format LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</li> </ul> <p>16. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p>	<p>5. Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Th 2025</li> <li>b. Dokumen hasil CHR dan LHR</li> </ul> <p>6. Revisi PABJ dan P3DN TW2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan P3DN TW2</li> <li>b. Dokumen CHR dan LHR</li> </ul> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Undangan</li> <li>2) Absen</li> <li>3) Notula</li> <li>4) Dokumentasi</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2) BA Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>3) Laporan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Panel TPI, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Panel TPI</li> <li>2) Laporan Panel TPI</li> <li>3) Surat Informasi Hasil Panel ke Setjen</li> </ul> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempilapan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</li> <li>2) Surat Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM</li> <li>- Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Menpan RB, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <li>1) Surat Perintah Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> <li>2) Laporan Pengiriputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> </ul> <p>8. Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> <li>- Laporan Hasil Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> </ul> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saliter Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekin Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</li> <li>- Notula hasil rapat</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>
<p>17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>	<p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saliter Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekin Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</li> <li>- Notula hasil rapat</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>
<p>17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>	<p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saliter Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekin Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</li> <li>- Notula hasil rapat</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>

<p><b>Triwulan III</b></p> <p>1. Telah Selesai:  a. Melaksanakan studi banding ke KL lain  b. Menyampaikan laporan Telah Selesai Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Melaksanakan Workshop (tentative PNBP)  b. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja  c. Melaksanakan Penyusunan Konsep Surat Perintah  d. Melaksanakan Audit Program pada masing masing Unit Eselon I  (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024j)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Reviu LK Semester I 2024  a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Menyelenggarakan Workshop  c. Melaksanakan Reviu LK  d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PABJ dan P3DN TW3  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW3.  b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW3  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Th 2025  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Th 2025  b. Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Th 2025  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Th 2026  a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Melaksanakan Reviu LK  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun  Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>9. Audit TIK  Pelaporan kompliasi Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  Penyusunan laporan kompliasi</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Potkekip/Potkekim Tahun Anggaran 2024  Penyusunan Laporan Kompliasi</p> <p>12. Pemantauan Tindakan/Rekomendasi Internal dan Eksternal  Melaksanakan Pemantauan Tindakan/Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <p>13. Audit PNBP  a. Rapat perencanaan audit PNBP;  b. PKA audit PNBP;  c. Pelaksanaan audit PNBP.</p> <p>14. Data Integritas  a. Monitoring rencana aksi Data Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra  a. Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional  Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>17. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p><b>Triwulan III</b></p> <p>1. Telah Selesai:  a. Surat permohonan ke K/L lain, laporan dan dokumentasi studi banding ke K/L lain  b. Nota Dinas penyampaian Laporan Telah Selesai Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Roundw, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program pada Unit Eselon I, Laporan Kegiatan  b. Program Kerja  c. Surat Perintah  d. LHA Program pada masing2 ITWIL. ( ITWIL 1 s.d. VI )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09  - Undangan  - Absensi  - Notula dan Dokumentasi Foto  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  - Nodin Permintaan Nama Evaluator;  - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09.</p> <p>4. Reviu LK Semester I 2024  a. UANG terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Laporan kegiatan Workshop  c. Dokumen CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PABJ dan P3DN TW3  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW3.  b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Th 2025  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Th 2025  b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Th 2026  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Dokumen CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun  - Surat Perintah Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - BA Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Laporan Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Surat Informasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang Satuan Kerja Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Laporan Kompliasi ke Merpan terkait Satuan Kerja Yang dilakukan Monev Sudah Mendapatkan Predikat 2 Tahun</p> <p>9. Audit TIK  - Laporan Kompliasi Pelaksanaan Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  - Laporan kompliasi pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Potkekip/Potkekim Tahun Anggaran 2024  - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan CASN yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM</p> <p>13. Audit PNBP  a. Hasil rapat perencanaan audit PNBP  b. Laporan hasil PKA Audit PNBP  c. PKA Audit PNBP;Laporan hasil Audit PNBP pada tingkat satker</p> <p>14. Data Integritas  Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra  Laporan Hasil Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional  Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>17. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	
<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telah Selesai:  a. Melaksanakan rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  b. Persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Melaksanakan rapat penyusunan kompliasi Laporan Hasil Audit Program  b. Membuat Laporan Hasil Audit Kinerja Program  (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistens) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksanaan Teknis</p> <p>4. Reviu PABJ dan P3DN TW4  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW4.  b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW4  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>5. Reviu LK TW3 TA 2024  a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Melaksanakan Reviu LK  c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p>	<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telah Selesai:  a. Undangan, Notula, Absensi, Dokumentasi rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  b. Undangan, Absensi, dan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat penyusunan kompliasi laporan antar koordinator Audit Program (ITWIL 1 s.d. VI)  b. LHA Program ( kompliasi )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12  - Undangan  - Absensi  - Notula dan Dokumentasi Foto  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  - Nodin Permintaan Nama Evaluator;  - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12.</p> <p>3. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistens) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksanaan Teknis  Rapat Persiapan  - Undangan</p>	



RENCANA AKSI PERCEPATAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU (dalam ribuan rupiah)			RENCANA AKSI		KETERANGAN
				PERHITUNGAN (MANUAL IKU)	DASAR BUKTI / PEMENUHAN	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RANGKAI	PAGU	REALISASI (Garis oleh Daud dan warna per triwulan)	KEGIATAN RENCANA AKSI	DATA DUKUNG	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL</b>											
1	SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah (Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)	<p>SP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.</p> <p>SP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPPI</p> <p>SP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko</p> <p>SP WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</p> <p>SP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APSP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	20	Mengikuti formula perhitungan KemerkumHAM PAN dan RB sesuai dengan Peraturan PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1,194,471,000	Akasi dari penuntasan nilai IK 1.1 (fokus evaluasi internal) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen		
			0.802	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	691,595,000	Akasi dari penuntasan nilai IK 1.7 (fokus struktur dan proses SPPI terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0			
			3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1,178,357,000	Akasi dari penuntasan nilai IK 1.2 (Manajemen Risiko Indeks SPPI Terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0			
			3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	21,967,347,000	Akasi dari penuntasan nilai IK 1.4 (efektivitas pengendalian korupsi SPPI Terintegrasi) pada Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	0			
			3.1	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021	Surat hasil evaluasi KAPP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1,568,485,600	Akasi dari anggaran ROR BIC Layanan Manajemen SDM pada Sekretariat Inspektur Jenderal	0			
<b>KEGIATAN PENAWARAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III</b>											
1	SP WA.5 Sk. 1565 Terwujudnya Penyelenggaraan SPPI dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektur Wilayah III	<p>ESK 1565.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP internal KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.</p> <p>ESK 1565.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses <b>DIKALI</b> 100%</p> <p>ESK 1565.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses <b>DIKALI</b> 100%</p>	90%	(Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP <b>DIKALI</b> 100%)	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	41,798,000	Akasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Revu LKSP pada Inspektur Wilayah III	0	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Evaluasi SAKIP dan Revu LK;</li> <li>2. - Workshop Revu LK</li> <li>3. - Workshop Evaluasi SAKIP;</li> <li>3. Revu LK Tk. Kl.</li> <li>4. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan I</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon 1</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan II;</li> <li>3. Revu Hasil Evaluasi Mandiri Kanwil</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring hasil revu LK Kementerian</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan III</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan IV</li> <li>2. Revu LK Tk Kanwil Tahun 2024</li> </ul>	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Revu LK;</li> <li>2. - Laporan Hasil Workshop Revu LKSP;</li> <li>3. Laporan Hasil Workshop evaluasi AKIP;</li> <li>3. Laporan Hasil Revu LKSP Tk. Kl.;</li> <li>4. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan I</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon 1;</li> <li>2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II;</li> <li>3. Laporan Hasil Revu Hasil Evaluasi Mandiri Kanwil</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut hasil Revu LK Kementerian.</li> <li>2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APP. Triwulan III</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Monitoring atas Hasil Evaluasi AKIP Triwulan IV</li> <li>2. Laporan Revu LK Tk Kanwil tahun 2024</li> </ul>	Inspektur Wilayah III
			90%	(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses <b>DIKALI</b> 100%)	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	36,810,000	Akasi dari anggaran kegiatan Pendampingan/Evaluasi/penjaminan kualitas SPPI pada Inspektur Wilayah III	0	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I).</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>2. Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024;</li> <li>3. Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II);</li> <li>4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024;</li> <li>5. FGD Penjaminan Kualitas SPPI KemerkumHAM Tahun 2024.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan III);</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024;</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV);</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2022 dan 2023 serta Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024.</li> </ul>	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hal Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Undangan dan notula rapat pembahasan Areas of Improvement hasil evaluasi maturitas SPPI terintegrasi tahun 2023 bersama BPKP;</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>2. Laporan pelaksanaan penyusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>3. Kertas Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPPI 2024;</li> <li>4. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan II);</li> <li>5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024;</li> <li>6. Surat Perintah, Kertas Kerja, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan telah Dilakukan Penjaminan Kualitas SPPI KemerkumHAM Tahun 2024.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan III);</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Notula rapat koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024;</li> <li>2. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan IV);</li> <li>3. Surat Perintah, Berita Acara dan Laporan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2022 dan 2023;</li> <li>4. Berita Acara Pembahasan Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024.</li> </ul>	Inspektur Wilayah III
			90%	(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses <b>DIKALI</b> 100%)	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	373,045,000	Akasi dari anggaran Kegiatan Pendampingan/Evaluasi/Manajemen Risiko pada Inspektur Wilayah III	0	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat masukan saran atas Rancangan PermerkumHAM tentang MR yang disampaikan Sekretariat Jenderal;</li> <li>- Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi;</li> <li>2. Surat yang ditujukan kepada Eselon 1 terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi;</li> <li>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III);</li> </ul> <p>Triwulan V:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).</li> </ul>	Inspektur Wilayah III	

<p>ISK 1565.4</p> <p>Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III</p>	<p>90%</p> <p>Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III</p>	<p>Surat hasil evaluasi SPP Tertinggi Kementerian yang diterbitkan oleh BPKP</p> <p><b>DIBAGI</b></p> <p>Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi)</p> <p><b>DIBAGI</b> 100%</p>	<p>1. Kegiatan Audit</p> <p>2. Kegiatan Revu (Kecual Revu LK/DP)</p> <p>3. Kegiatan Evaluasi (Kecual Evaluasi AKIP dan PK SPP)</p> <p>4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>3.553,642.000</p> <p>Alokasi dari seluruh anggaran Inspektorat Wilayah III setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi S&amp;A/Revu LK/DP dan kegiatan Pendampingan Evaluasi perjam</p>	<p>0. Triwulan I</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telah Selesai (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>b. Melaksanakan Rapat Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Telah Selesai tahun 2023 (ITWIL I, III, V)</p> <p>c. Persiapan pelaksanaan Telah Selesai tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024</p> <p>d. Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaahan Selesai Internal ke-2</p> <p>e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Telaahan Selesai</p> <p>f. Melaksanakan Penyusunan Konsep SP dan Proses SP</p> <p>g. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Data/Dokumen</p> <p>h. Pelaksanaan Telah Selesai (ITWIL II, IV, VI) di bulan Maret 2024</p> <p>i. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Telah Selesai (ITWIL I, III, V)</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>(Cat. Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Penetapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kementerian</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SK Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakatan</li> </ul> <p>5. Revu LK Semester II 2023</p> <p>a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian</p> <p>b. Menyelenggarakan Workshop</p> <p>c. Melaksanakan Revu LK</p> <p>d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvu</p> <p>6. Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>b. Melaksanakan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Revu PKP LK Tahun 2023</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>b. Melaksanakan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvu</p> <p>8. Audit Keabsahan Barjas</p> <p>a. Perencanaan dan persiapan pemenuhan data dukung</p> <p>b. Pelaksanaan Audit</p> <p>c. Pelaporan Audit</p> <p>9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal</li> <li>- Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023</li> </ul> <p>10. Audit TK</p> <p>a. Perencanaan Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>- Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK</li> <li>- Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I</li> <li>- Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN</li> <li>- PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN</li> </ul> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Polek/Polekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>- Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal</li> <li>- Rapat Koordinasi seluruh tim Penawilan Inspektorat Wilayah</li> <li>- Pembentukan Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektorat Jenderal</li> </ul> <p>12. Data Integritas</p> <p>a. Monitoring rencana aksi Data Integritas</p> <p>13. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra</p> <p>b. Persiapan Evaluasi Renstra</p> <p>14. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024</p> <p>15. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>16. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Telah Selesai (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>2023 (Telah Selesai antara ITWIL I, III, dan VI)</p> <p>c. Nota Dinas dan Surat Perintah Telah Selesai tahun 2024 (Telah Selesai antara ITWIL II, IV, dan VI)</p> <p>d. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaahan Selesai Internal ke-2</p> <p>e. Program Kerja Telaahan Selesai</p> <p>f. Nota Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan Telah Selesai</p> <p>g. Surat Perencanaan Data/Dokumen</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Penetapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kementerian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulir Undangan Peserta Workshop RB;</li> <li>- Daftar Hadir;</li> <li>- Notula dan Dokumentasi Foto;</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Workshop RB;</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</li> <li>- Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</li> <li>- Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03.</li> </ul> <p>4. Joint Audit</p> <p>a. Notulir Undangan Rapat;</p> <p>b. Daftar Hadir;</p> <p>c. Notula dan Dokumentasi Foto;</p> <p>d. SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dan Fungsi Pemasaryakatan;</p> <p>5. Revu LK Semester II 2023</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen</p> <p>b. Laporan Kegiatan Workshop</p> <p>c. Dokumen revu CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvu</p> <p>6. Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>b. Dokumen hasil revu berupa CHR, LHR dan LHR.</p> <p>7. Revu PKP</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW1</p> <p>b. Dokumen hasil revu berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvu.</p> <p>8. Audit Keabsahan Barjas</p> <p>a. Dokumen Program Kerja Audit</p> <p>b. Surat Tugas Pelaksanaan Audit</p> <p>c. Dokumen Laporan Hasil Audit</p> <p>9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal</li> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024.</li> </ul> <p>10. Audit TK</p> <p>a. Perencanaan Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektorat Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK</li> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I</li> <li>- Notula dan Dokumentasi hasil Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN</li> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN</li> </ul> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Polek/Polekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>- Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal</li> <li>- Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi seluruh tim Penawilan Inspektorat Wilayah</li> <li>- Surat Perintah Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektorat Jenderal</li> </ul> <p>12. Data Integritas</p> <p>a. Laporan Monitoring rencana aksi Data Integritas</p> <p>13. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Notulir rapat dan Surat Keputusan Tim Koordinator Revu Renstra</p> <p>b. Notulir rapat persiapan Revu Renstra</p> <p>14. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>15. Laporan Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>Inspektorat Wilayah III</p>
					<p>1. Triwulan II</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Penyusunan Laporan Telah Selesai Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI</p> <p>b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Telah Selesai Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V</p> <p>c. Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telah Selesai di lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>d. Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke KL lain (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Melaksanakan rapat persiapan Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>b. Melaksanakan rapat persiapan workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (tentative/PNBT)</p> <p>(Cat. Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Melakukan Monitoring (Pegantun/Asisten) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Peleaksan Teknis</p> <p>d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektorat Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>4. Joint Audit Kinerja Layanan Pemasaryakatan</p> <p>a. Pelaksanaan Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakatan</p> <p>5. Revu RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu RKAKL Pagu Indikatif</p>	<p>1. Triwulan II</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Laporan Telah Selesai Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI</p> <p>b. Laporan Tindak Lanjut Telah Selesai Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V</p> <p>c. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telah Selesai di lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>d. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi rapat persiapan studi banding ke KL lain (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>b. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Absensi</li> <li>- Notula dan Dokumentasi Foto</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulir Perencanaan Nama Evaluator;</li> <li>- Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</li> <li>- Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</li> <li>- Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06.</li> </ul> <p>c. Melakukan Monitoring (Pegantun/Asisten) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Peleaksan Teknis</p> <p>d. Penyusunan Laporan</p> <p>e. Undangan</p>	

<p>Tahun 2025</p> <p>b. Melaksanakan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Revisi PABJ dan PSDN TW2</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW2</p> <p>b. Melaksanakan Revisi PABJ dan PSDN TW2</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Panel TPI</li> </ul> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal.</li> <li>- Pengiriman usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Menpan RB</li> </ul> <p>8. Audit TK</p> <p>Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</p> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Sakter Luar Negeri Pelaksanaan Audit</p> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindakan/lanjutan Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pemantauan Tindakan/lanjutan Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan perencanaan audit PNPB</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <p>a. Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</p> <p>b. Monitoring rencana aksi Data Integritas</p> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Penyusunan PKE, KKE dan format LHE Renstra</p> <p>15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Notula dan Dokumentasi Foto Pelaksanaan</li> <li>- Surat Perintah;</li> <li>- Kertas Kerja Wawancara;</li> <li>- Laporan Pelaksanaan.</li> </ul> <p>d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>- SK Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>- Draft Peraturan Ijen tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>- Laporan Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>4. Joint Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampling</li> <li>- Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit</li> </ul> <p>b. Surat Perintah Pengujian KKA dan PKA</p> <p>c. Laporan Hasil Pengujian KKA dan PKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Surat Perintah;</li> <li>- Laporan Hasil Audit Joint Audit;</li> <li>- Petunjuk Penanganan dan Penentian Hasil Joint Audit</li> </ul> <p>5. Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</li> <li>b. Dokumen Hasil CHR dan LHR</li> </ul> <p>6. Revisi PABJ dan PSDN TW2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW2.</li> <li>b. Dokumen CHR dan LHR.</li> </ul> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</li> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undangan</li> <li>2) Absen</li> <li>3) Notula</li> <li>4) Dokumentasi</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2) BA Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>3) Laporan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Panel TPI, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Panel TPI</li> <li>2) Laporan Panel TPI</li> <li>3) Surat Informasi Hasil Panel ke Setjen</li> </ol> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</li> <li>2) Surat Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 yang diandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Menpan RB, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Pengiriman usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> <li>2) Laporan Pengiriman usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> </ol> <p>8. Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> <li>- Laporan Hasil Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> </ul> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Sakter Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Poltekim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesamaptan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPKF</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindakan/lanjutan Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindakan/lanjutan Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB Tinjauan II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</li> <li>b. Notula hasil rapat</li> </ul> <p>13. Data Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas</li> <li>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Data Integritas</li> </ul> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</li> </ul> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	
---	--	--



<p><b>Triwulan II</b></p> <p>1. Telaah Sejawat:  a. Melaksanakan studi banding ke KL lain  b. Menyampaikan laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Melaksanakan Workshop (tentative PNBP)  b. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja  c. Melaksanakan Penyusunan Konsep Surat Perintah  d. Melaksanakan Audit Program pada masing masing Unit Eselon I  (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Reviu LK Semester I 2024  a. Koordinasi dengan Sejen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Menyelenggarakan Workshop  c. Melaksanakan Reviu LK  d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PAPBJ dan P3DN TW3  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBJ dan P3DN TW3  b. Melaksanakan Reviu PAPBJ dan P3DN TW3  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025  b. Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Tahun 2026  a. Koordinasi dengan Sejen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Melaksanakan Reviu LK  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>9. Audit TIK  Pelaporan kompilasi Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  Penyusunan laporan kompilasi</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024  Penyusunan Laporan Kompilasi</p> <p>12. Pemantauan Tindakan/ur Rekomendasi Internal dan Eksternal  Melaksanakan Pemantauan Tindakan/ur Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <p>13. Audit PNBP  a. Rapat perencanaan audit PNBP;  b. PKG audit PNBP;  c. Pelaksanaan audit PNBP.</p> <p>14. Duta Integritas  a. Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra  a. Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional  Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>17. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p><b>Triwulan III</b></p> <p>1. Telaah Sejawat:  a. Surat pemohonan ke K/L lain, laporan dan dokumentasi studi banding ke K/L lain  b. Nota Dinas penyampaian Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program pada Unit Eselon I. Laporan Kegiatan  b. Program Kerja  c. Surat Perintah  d. LHA Program pada masing2 TTWIL ( TTWIL I s.d. VI )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09  - Undangan  - Absensi  - Notula dan Dokumentasi Foto  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  - Nodin Permintaan Nama Evaluator;  - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;  - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09.</p> <p>4. Reviu LK Semester I 2024  a. UANG terkait Koordinasi dengan Sejen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Laporan kegiatan Workshop  c. Dokumen CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PAPBJ dan P3DN TW3  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBJ dan P3DN TW3.  b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025  b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Tahun 2026  a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sejen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Dokumen CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun  - Surat Perintah Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - BA Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Laporan Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Surat Informasi ke Karwil Kementerian Hukum dan HAM yang Satuan Kerja Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun  - Laporan Kompilasi ke Merpan terkait Satuan Kerja Yang dilakukan Monev Sudah Mendapatkan Predikat 2 Tahun</p> <p>9. Audit TIK  - Laporan Kompilasi Pelaksanaan Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  - Laporan kompilasi pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024  - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan CASN yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM</p> <p>13. Audit PNBP  a. Hasil rapat perencanaan audit PNBP  b. Laporan hasil PKG Audit PNBP  c. PKA Audit PNBPLaporan hasil Audit PNBP pada tingkat satker</p> <p>14. Duta Integritas  Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra  Laporan Hasil Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional  Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024</p> <p>17. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait</p>	
<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telaah Sejawat:  a. Melaksanakan rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjambinan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  b. Persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjambinan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Melaksanakan rapat penyusunan kompilasi Laporan Hasil Audit Program  b. Membuat Laporan Hasil Audit Kinerja Program  (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</p> <p>4. Reviu PAPBJ dan P3DN TW4  a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBJ dan P3DN TW4  b. Melaksanakan Reviu PAPBJ dan P3DN TW4  c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>5. Reviu LK TW3 TA. 2024  a. Koordinasi dengan Sejen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.  b. Melaksanakan Reviu LK  c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p>	<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telaah Sejawat:  a. Undangan, Notula, Absensi, Dokumentasi rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjambinan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  b. Undangan, Absensi, dan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjambinan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. <b>Audit Kinerja Program:</b>  a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat penyusunan kompilasi laporan antar koordinator Audit Program (TTWIL I s.d. VI)  b. LHA Program ( kompilasi )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi  a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12  - Undangan  - Absensi  - Notula dan Dokumentasi Foto  b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi  - Nodin Permintaan Nama Evaluator;  - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;  - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12.</p> <p>c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis  Rapat Persiapan  - Undangan</p>	



RENCANA AKSI PERCAPAIAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN				PAGU (dalam ribuan rupiah)		RENCANA AKSI		KETERANGAN			
	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PERHITUNGAN (MANUAL IKU)	DASAR BUKTI / FENOMENA	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RKAKL	PAGU	REALISASI (diisi oleh Birel dan sekret per triwulan)		KEGIATAN RENCANA AKSI	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN (proses/selesai)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL												
1	SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah (Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)	ISIP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemerkumham ISIP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPPI ISIP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko ISIP WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi ISIP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APPI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 0.802 3.0 3.0 3.1	Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan Nomenklatur Nomor 88 Tahun 2021 Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB. Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP Surat hasil evaluasi KAPIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	1,194,471,000 691,595,000 1,178,357,000 21,967,347,000 1,568,485,600	0 0 0 0 0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen			
KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV												
1	ISIP WA.5 SK 1566.1 Penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan SPPI dan Evaluasi internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektur Wilayah IV	ISK 1566.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah IV	90%	(Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP <b>DIKALI</b> 100%)	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1. Evaluasi AKIP 2. Revisi LKIP 3. Pendampingan (undangan dari Biro Perencanaan) 4. Pemantauan Tindaklanjuti 5. Workshop FGD terkait AKIP	123,240,000	0	Triwulan I: - Penetapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKIP; - Workshop Revisi LKIP - Workshop Evaluasi SAKIP; 3. Revisi LKIP TK KL; 4. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan I Triwulan II: 1. Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan II; 3. Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil Triwulan III: 1. Monitoring hasil revisi LKIP Kementerian 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan III Triwulan IV: 1. Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan IV 2. Revisi LKIP TK Karwil Tahun 2024	Triwulan I: 1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKIP; 2. - Laporan Hasil Workshop Revisi LKIP; - Laporan Hasil Workshop Evaluasi AKIP; 3. Laporan Hasil Revisi LKIP TK KL; 4. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan I Triwulan II: 1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I; 2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II; 3. Laporan Hasil Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil. Triwulan III: 1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut hasil Revisi LKIP Kementerian. 2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APPI Triwulan III Triwulan IV: 1. Laporan Hasil Monitoring atas hasil Evaluasi AKIP Triwulan IV 2. Laporan Revisi LKIP TK Karwil tahun 2024	Inspektur Wilayah IV	
	ISK 1566.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah IV	ISK 1566.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah IV	90%	(Jumlah Renaksi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI untuk komponen struktur dan proses) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pendampingan Penguatan SPPI 2. Penjaminan Kualitas Maturitas SPPI 3. Pemantauan Tindaklanjuti 4. Workshop FGD terkait SPPI (Strukpro)	39,490,000	0	Triwulan I: 1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I). Triwulan II: 1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024; 3. Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II); 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024; 5. FGD Penjaminan Kualitas SPPI Kemerkumham Tahun 2024. Triwulan III: Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan III); Triwulan IV: 1. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024; 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi SPPI Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV); 3. Melaksanakan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2022 dan 2023 serta Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024.	Triwulan I: 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hal Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Undangan dan notula rapat pembahasan Areas of Improvement hasil evaluasi maturitas SPPI terintegrasi tahun 2023 bersama BPKP; Triwulan II: 1. Draft Pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Laporan pelaksanaan penyusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPPI di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kertas Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPPI 2024; 4. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi Kemerkumham (Triwulan II); 5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPPI 2024; 6. Surat Perintah, Kertas Kerja, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan telah Dilakukan Penjaminan Kualitas SPPI Kemerkumham Tahun 2024. Triwulan III: Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi Kemerkumham (Triwulan III); Triwulan IV: 1. Notula rapat koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024; 2. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPPI Terintegrasi Kemerkumham (Triwulan IV); 3. Surat Perintah, Berita Acara dan Laporan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2022 dan 2023; 4. Berita Acara Pembahasan Notasi Hasil Evaluasi SPPI Tahun 2024.	Inspektur Wilayah IV	
	ISK 1566.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI terkait manajemen risiko di Inspektur Wilayah IV	ISK 1566.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI terkait manajemen risiko di Inspektur Wilayah IV	90%	(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI terkait Manajemen Risiko yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPPI terkait Manajemen Risiko) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPPI Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pemantauan Tindaklanjuti 2. Workshop/ FGD terkait SPPI (MR) 3. Pendampingan Penyusunan/ Penerapan Manajemen Risiko 4. Evaluasi Manajemen Risiko	252,824,000	0	Triwulan I: - Rapat masukan saran atas Rancangan Permenkumham tentang MR yang disampaikan Sekretariat Jenderal; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I). Triwulan II: - Rajat Pelaksanaan Evaluasi; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II). Triwulan III: - Evaluasi Penerapan MR; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III) Triwulan IV: - Penyusunan Laporan Komposisi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; (ITWIL III) - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).	1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Surat yang ditujukan kepada Eselon I terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I). 1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II). 1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III); 1. Laporan Komposisi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPPI Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).	Inspektur Wilayah IV	

<p>ISK 1566.4 Persetujuan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah IV</p>	<p>90%</p>	<p>(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi yang diterbitkan oleh BPKP dan PK SPP) Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi) <b>DIKALAI 100%</b></p>	<p>Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi Kementerian/MD yang diterbitkan oleh BPKP</p>	<p>1. Kegiatan Audit 2. Kegiatan Revisi (kecuali Revisi LCI/PI) 3. Kegiatan Evaluasi (kecuali Evaluasi AKIP dan PK SPP) 4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>3,589,741,000</p>	<p>Akses dari seluruh anggaran Inspektoral Wilayah IV setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAMP/Revisi LCI/PI dan Kegiatan Pendampingan/Evaluasi perjem</p>	<p>0. Triwulan I 1. Telaah Sejawat: a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan Rapat Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (ITWIL I, II, V) c. Persiapan pelaksanaan Telaah Sejawat tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024 d. Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2 e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Telaah Sejawat f. Melaksanakan Penyusunan Konsep SP dan Proses SP g. Melaksanakan Penyusunan Pemetaan Data/Dokumen h. Pelaksanaan Telaah Sejawat (ITWIL II, IV, V) di bulan Maret 2024 i. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Telaah Sejawat (ITWIL I, III, V) 2. Audit Kinerja Program: Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Money RKT RB per triwulan Kementerian b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi 4. Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran - Penyusunan SK Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran 5. Revisi LK Semester II 2023 a. Koordinasi dengan Seljen terkait timeline pelaksanaan Revisi LK Tingkat Eselon I dan Kementerian, b. Menyelenggarakan Workshop c. Melaksanakan Revisi LK d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telaah Direvisi 6. Revisi PABJU dan PSDN TW1 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJU dan PSDN TW1 b. Melaksanakan Revisi PABJU dan PSDN TW1 c. Menyusun CHR dan LHR. 7. Revisi PKP LK Tahun 2023 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJU dan PSDN TW1 b. Melaksanakan Revisi PABJU dan PSDN TW1 c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telaah Direvisi. 8. Audit Ketataan Barjas a. Perencanaan dan persiapan pemenuhan data dukung b. Pelaksanaan Audit c. Pelaporan Audit 9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 - Pembentukan Tim Penilai Internal Inspektoral Jenderal - Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 10. Audit TK a. Perencanaan Audit TK - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Inspektoral Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK - Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I - Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN - PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN 11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024 a. Perencanaan - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektoral Wilayah - Pembentukan Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektoral Jenderal 12. Duta Integritas Laporan Monitoring rencana aksi Duta Integritas 13. Evaluasi Renstra a. Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra b. Persiapan Evaluasi Renstra 14. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024 15. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory) 16. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>	<p>Triwulan I 1. Telaah Sejawat: a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (Telaah Sejawat antara ITWIL I, III, dan VI) c. Notul Dinas dan Surat Perintah Telaah Sejawat tahun 2024 (Telaah Sejawat antara ITWIL II, IV, dan VI) d. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2 e. Program Kerja Telaah Sejawat f. Notul Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan Telaah Sejawat g. Surat Permintaan Data/ Dokumen 2. Audit Kinerja Program: Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) 3. Reformasi Birokrasi a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Money RKT RB per triwulan Kementerian - Notul Undangan Peserta Workshop RB; - Daftar Hadir; - Notula dan Dokumentasi Foto; - Laporan Pelaksanaan Workshop RB; b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03. 4. Joint Audit a. Notul Undangan Rapat; b. Daftar Hadir; c. Notula dan Dokumentasi Foto; d. SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dab Fungsi Pemasaran; 5. Revisi LK Semester I 2023 a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Seljen b. Laporan Kegiatan Workshop c. Dokumen revisi CHR, LHR dan Pernyataan Telaah Direvisi 6. Revisi PABJU dan PSDN TW1 a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJU dan PSDN TW1. b. Dokumen hasil revisi berupa CHR dan LHR. 7. Revisi PKP a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJU dan PSDN TW1. b. Dokumen hasil revisi berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telaah Direvisi. 8. Audit Ketataan Barjas a. Dokumen Program Kerja Audit b. Surat Tugas Pelaksanaan Audit c. Dokumen Laporan Hasil Audit 9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024 - SK Tim Penilai Internal Inspektoral Jenderal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024. 10. Audit TK a. Perencanaan Audit TK - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi Tim Internal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektoral Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I - Notula dan Dokumentasi hasil Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN 11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024 a. Perencanaan - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Internal - Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektoral Wilayah - Surat Perintah Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektoral Jenderal 12. Duta Integritas Laporan Monitoring rencana aksi Duta Integritas 13. Evaluasi Renstra a. Notulun rapat dan Surat Keputusan Tim Koordinator Revisi Renstra b. Notulun rapat persiapan Revisi Renstra 14. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional 15. Laporan Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory) 16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektoral Wilayah</p>	<p>Inspektoral Wilayah IV</p>
							<p>Triwulan II 1. Telaah Sejawat: a. Penyusunan Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektoral Jenderal d. Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI) 2. Audit Kinerja Program: a. Melaksanakan rapat persiapan Audit Program ( ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan rapat persiapan workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program ( ITWIL I s.d. VI ) (tentative/PNSRP) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektoral Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Joint Audit Kinerja Laporan Pemasaran Pelaksanaan Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran</p>	<p>Triwulan II 1. Telaah Sejawat: a. Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Laporan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektoral Jenderal d. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI) 2. Audit Kinerja Program: a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 - Undangan - Absensi - Notula dan Dokumentasi Foto b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi - Notuln Permisian Nama Evaluator; - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06. c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis Rapat Persiapan - Undangan</p>	

										<p>5. Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <p>b. Melaksanakan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Revisi PABPJ dan P3DN TW2</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABPJ dan P3DN TW2</p> <p>b. Melaksanakan Revisi PABPJ dan P3DN TW2</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul> <p>- Panel TPI</p> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempitan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2023 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal.</li> <li>- Penghapusan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Merpan RB</li> </ul> <p>8. Audit TK</p> <p>Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</p> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saker Luar Negeri</p> <p>Pelaksanaan Audit</p> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Potekip/Potekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara</li> <li>- Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Potekip/Potekim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Pengawasan Tahap Keselamatan</li> <li>- Pengawasan Tahap WPPK</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan perencanaan audit PNPB</li> </ul> <p>13. Duta Integritas</p> <p>a. Evaluasi Kepemkuhan tentang Pembangunan Integritas</p> <p>b. Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Penyusunan PKE, KKE dan format LHE Renstra</p> <p>15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemerkumham tahun 2024</p> <p>16. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>- Absensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notula dan Dokumentasi Foto Pelaksanaan</li> <li>- Surat Perintah,</li> <li>- Kertas Kerja Wawancara,</li> <li>- Laporan Pelaksanaan,</li> </ul> <p>d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>- Draft Peraturan Ijen tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul> <p>4. Joint Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampling</li> <li>- Korpas PKA dan Kertas Kerja Joint Audit</li> <li>- Surat Perintah Pengujian KKA dan PKA</li> <li>- Laporan Hasil Pengujian KKA dan PKA</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Surat Perintah,</li> <li>- Laporan Hasil Audit Joint Audit,</li> <li>- Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Joint Audit</li> </ul> <p>5. Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait smeline pelaksanaan Revisi RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</li> <li>b. Dokumen Hasil CHR dan LHR</li> </ul> <p>6. Revisi PABPJ dan P3DN TW2</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait smeline pelaksanaan Revisi PABPJ dan P3DN TW2.</p> <p>b. Dokumen CHR dan LHR.</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM</p> <p>a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undangan</li> <li>2) Absen</li> <li>3) Notula</li> <li>3) Dokumentasi</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2) BA Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol> <p>3) Laporan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panel TPI, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Panel TPI</li> <li>2) Laporan Panel TPI</li> <li>3) Surat Biometri Hasil Panel ke Setjen</li> </ol> <p>b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempitan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal, dengan data dukung sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024</li> <li>2) Surat Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM</li> <li>- Penghapusan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Merpan RB, dengan data dukung sebagai berikut:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah Penghapusan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> <li>2) Laporan Penghapusan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</li> </ol> <p>8. Audit TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Pelaksanaan Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> <li>- Laporan Hasil Audit TK Aplikasi dan Infrastruktur</li> </ul> <p>9. Audit Kinerja dan Keuangan Saker Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> <li>- Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan LN</li> </ul> <p>10. Pengawasan CASN dan Catur Potekip/Potekim Tahun Anggaran 2024</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Pengadaan CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Pengawasan PSK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi</li> <li>- Laporan Pengangkatan Tahap PSK</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Potekip/Potekim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Psikotes</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap SKD</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap Keselamatan</li> <li>- Laporan Pengawasan Tahap WPPK</li> </ul> <p>11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>12. Audit PNPB Triwulan II</p> <p>a. Hasil Rapat persiapan perencanaan audit PNPB</p> <p>b. Notula hasil rapat</p> <p>13. Duta Integritas</p> <p>a. Draft Revisi Kepemkuhan tentang Pembangunan Integritas</p> <p>b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>14. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra</p> <p>15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemerkumham tahun 2024</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p> </ol>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Triwulan III</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Melaksanakan studi banding ke K/L lain</p> <p>b. Menyampaikan laporan Telah Selesai Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Melaksanakan Workshop (tentative) PNEP</p> <p>b. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja</p> <p>c. Melaksanakan Penyusunan Konsep Surat Perintah</p> <p>d. Melaksanakan Audit Program pada masing masing Unit Eselon I (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>4. Reviu LK Semester 1 2024</p> <p>a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</p> <p>b. Menyelenggarakan Workshop</p> <p>c. Melaksanakan Reviu LK</p> <p>d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PAPB dan P3DN TW3</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPB dan P3DN TW3.</p> <p>b. Melaksanakan Reviu PAPB dan P3DN TW3</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <p>b. Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Tahun 2025</p> <p>a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</p> <p>b. Melaksanakan Reviu LK</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>9. Audit TIK Pelayanan Komplisi Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri Penyusunan laporan komplisi</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Polhekip/Poltekam Tahun Anggaran 2024 Penyusunan Laporan Komplisi</p> <p>12. Pemantauan Tindakan/jejak Rekomendasi Internal dan Eksternal Melaksanakan Pemantauan Tindakan/jejak Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <p>13. Audit PNEP</p> <p>a. Rapat perencanaan audit PNEP;</p> <p>b. PKS audit PNEP;</p> <p>c. Pelaksanaan audit PNEP.</p> <p>14. Duta Integritas</p> <p>a. Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra</p> <p>a. Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementrian tahun 2024</p> <p>17. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p>Triwulan III</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Surat permohonan ke K/L lain, laporan dan dokumentasi studi banding ke K/L lain</p> <p>b. Nota Dinas penyalpaman Laporan Telah Selesai Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program pada Unit Eselon I, Laporan Kegiatan</p> <p>b. Program Kerja</p> <p>c. Surat Perintah</p> <p>d. LHA Program pada masing2 ITWIL ( ITWIL I s.d. VI )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09</p> <p>- Undangan</p> <p>- Absensi</p> <p>- Notula dan Dokumentasi Foto</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>- Nodin Permintaan Nama Evaluator;</p> <p>- Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;</p> <p>- Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;</p> <p>- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09;</p> <p>- Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09.</p> <p>4. Reviu LK Semester 1 2024</p> <p>a. UANG terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</p> <p>b. Laporan kegiatan Workshop</p> <p>c. Dokumen CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</p> <p>5. Reviu PAPB dan P3DN TW3</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPB dan P3DN TW3.</p> <p>b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>6. Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <p>b. Dokumen hasil berupa CHR dan LHR</p> <p>7. Reviu RK-BMN Tahun 2025</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</p> <p>b. Dokumen CHR dan LHR</p> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun</p> <p>- Surat Perintah Money Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun</p> <p>- BA Money Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun</p> <p>- Laporan Money Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun</p> <p>- Surat Informasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang Satuan Kerja Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun</p> <p>- Laporan Komplisi ke Menpan terkait Satuan Kerja Yang dilakukan Money Sudah Mendapatkan Predikat 2 Tahun</p> <p>9. Audit TIK</p> <p>- Laporan Komplisi Pelaksanaan Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri</p> <p>- Laporan komplisi pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Polhekip/Poltekam Tahun Anggaran 2024</p> <p>- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan CASN yang ditunjukan ke Menteri Hukum dan HAM</p> <p>13. Audit PNEP</p> <p>a. Hasil rapat perencanaan audit PNEP</p> <p>b. Laporan hasil PKS Audit PNEP</p> <p>c. PKA Audit PNEP/Laporan hasil Audit PNEP pada tingkat satker</p> <p>14. Duta Integritas</p> <p>Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementrian tahun 2024</p> <p>17. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>18. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait</p>	
			<p>Triwulan IV</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Melaksanakan rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjanjian Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>b. Persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjanjian Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Melaksanakan rapat penyusunan komplisi Laporan Hasil Audit Program</p> <p>b. Menituli Laporan Hasil Audit Kinerja Program (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</p> <p>4. Reviu PAPB dan P3DN TW4</p> <p>a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPB dan P3DN TW4.</p> <p>b. Melaksanakan Reviu PAPB dan P3DN TW4</p> <p>c. Menyusun CHR dan LHR</p> <p>5. Reviu LK TW3 TA 2024</p> <p>a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</p>	<p>Triwulan IV</p> <p>1. Telah Selesai:</p> <p>a. Undangan, Notula, Absensi, Dokumentasi rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjanjian Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>b. Undangan, Absensi, dan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Perjanjian Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <p>a. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat penyusunan komplisi laporan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>b. LHA Program ( komplisi )</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12</p> <p>- Undangan</p> <p>- Absensi</p> <p>- Notula dan Dokumentasi Foto</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>- Nodin Permintaan Nama Evaluator;</p> <p>- Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;</p> <p>- Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;</p> <p>- Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12;</p> <p>- Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12.</p> <p>c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Rapat Persiapan</p>		



RENCANA AKSI PERCAPTAAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN				PAGU (dalam ribuan rupiah)		RENCANA AKSI	KETERANGAN				
	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PERHITUNGAN (MANUAL IKU)	DASAR BUKTI / PEMENUHAN	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RKAKL			PAGU	REALISASI (Grafik oleh Itwll dan sekret per triwulan)	KEGIATAN RENCANA AKSI	DATA DUKUNG
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL												
1	SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Penguatan Sistem Pemerintahan Intern (Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)	SP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemerkumham	20	Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan Permendagri Nomor 88 Tahun 2021	Laporan hasil evaluasi AKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.		1,194,471,000	0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwll dan Sekretariat Itjen			
		SP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Muturas Penyelenggaraan SPiP	0,82	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPiP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	691,595,000	0				
		SP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko	3,0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPiP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP		1,178,357,000	0				
		SP WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPiP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP		21,967,347,000	0				
		SP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APSP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021	Surat hasil evaluasi KAPSP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Dukungan Manajemen dan Teknik ITJEN	1,568,485,600	0				
KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH V												
1	SP WA.5 SK 1567 Terwujudnya Penyelenggaraan SPiP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektoral Wilayah V	ISK 1567.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemerkumham sesuai kewenangan Inspektoral Wilayah V	90%	(Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP yang dilaksanakan <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP) <b>DIKALI</b> 100%	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1. Evaluasi AKIP 2. Revisi LKIP 3. Pendampingan (undangan dari Biro Perencanaan) 4. Pemantauan Tindaklanjuti 5. Workshop FGD terkait AKIP	732,919,000	0	<p>0 Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKIP;</li> <li>2. Workshop Revisi LKIP - Workshop Evaluasi SAKIP;</li> <li>3. Revisi LKIP TK. KL;</li> <li>4. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan I</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan II;</li> <li>3. Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring hasil revisi LKIP Kementerian</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan III</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan IV</li> <li>2. Revisi LKIP TK Karwil Tahun 2024</li> </ul>	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKIP;</li> <li>2. Laporan Hasil Workshop Revisi LKIP;</li> <li>3. Laporan Hasil Workshop Evaluasi AKIP;</li> <li>4. Laporan Hasil Revisi LKIP TK. KL;</li> <li>4. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan I</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I</li> <li>2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II;</li> <li>3. Laporan Hasil Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut hasil Revisi LKIP Kementerian</li> <li>2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Mengan dan APSP Triwulan III</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Monitoring atas hasil Evaluasi AKIP Triwulan IV</li> <li>2. Laporan Revisi LKIP TK Karwil tahun 2024</li> </ul>	Inspektoral Wilayah V	
		ISK 1567.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektoral Wilayah V	90%	(Jumlah Renaksi peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP untuk komponen struktur dan proses yang dilaksanakan <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP untuk komponen struktur dan proses) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPiP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pendampingan Pengangan SPiP 2. Penjaminan Kualitas Muturas SPiP 3. Pemantauan Tindaklanjuti 4. Workshop FGD terkait SPiP (Strategic)	1,399,000	0	<p>0 Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Rapat Penetapan Kegiatan Penilaian Mandiri Muturas SPiP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi SPiP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I);</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPiP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>2. Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPiP 2024;</li> <li>3. Monitoring Hasil Evaluasi SPiP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II);</li> <li>4. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPiP 2024;</li> <li>5. FGD Penjaminan Kualitas SPiP Kemerkumham Tahun 2024.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil pemantauan atau Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPiP Terintegrasi Kemerkumham (Triwulan III);</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP atas Notasi Hasil Evaluasi SPiP Tahun 2024;</li> <li>2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi SPiP Terkait Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV);</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPiP Tahun 2022 dan 2023 serta Notasi Hasil Evaluasi SPiP Tahun 2024.</li> </ul>	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hal Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Muturas SPiP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</li> <li>2. Undangan dan notula rapat pembahasan Areas of Improvement hasil evaluasi muturas SPiP terintegrasi tahun 2023 bersama BPKP;</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Pedoman Penjaminan Kualitas SPiP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>2. Laporan pelaksanaan penyusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPiP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>3. Kertas Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPiP 2024;</li> <li>4. Laporan hasil pemantauan atau Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPiP Terintegrasi Kemerkumham (Triwulan II);</li> <li>5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPiP 2024;</li> <li>6. Surat Perintah, Kertas Kerja, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan telah Dilakukan Penjaminan Kualitas SPiP Kemerkumham Tahun 2024.</li> </ul>	Inspektoral Wilayah V	
		ISK 1567.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP terkait manajemen risiko di Inspektoral Wilayah V	90%	(Jumlah Renaksi peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP terkait manajemen risiko yang dilaksanakan <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan muturas penyelenggaraan SPiP terkait Manajemen Risiko) <b>DIKALI</b> 100%	Surat hasil evaluasi SPiP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pemantauan Tindaklanjuti 2. Workshop FGD terkait SPiP (MR) 3. Pendampingan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko 4. Evaluasi Manajemen Risiko	133,621,000	0	<p>0 Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat masukan saran atas Rancangan Permenkumham tentang MR yang disampaikan Sekretariat Jenderal;</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pelaksanaan Evaluasi;</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Penerapan MR;</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III)</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; (TWILL III)</li> <li>2. Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).</li> </ul>	<p>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi;</p> <p>2. Surat yang ditujukan kepada Eselon I terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).</p> <p>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi;</p> <p>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).</p> <p>1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</p> <p>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III);</p> <p>1. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024;</p> <p>2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Muturas Penyelenggaraan SPiP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).</p>	Inspektoral Wilayah V	



<p>SK.15674</p> <p>Peningkatan indeks lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektori Wilayah V</p>	<p>90%</p>	<p>(Jumlah Renaksi peninjauan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi yang ditindaklanjuti) <b>DBAGI</b></p> <p>Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi) <b>DIKALI 100%</b></p>	<p>Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi Kemerkumaha (focussal Reviu KLIIP)</p> <p>3. Kegiatan Evaluasi (focussal Evaluasi AKIP dan PK SPP)</p> <p>4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>1. Kegiatan Audit</p> <p>2. Kegiatan Reviu (focussal Reviu KLIIP)</p> <p>3. Kegiatan Evaluasi (focussal Evaluasi AKIP dan PK SPP)</p> <p>4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>3,137,356,000</p>	<p>Aksi dari seluruh anggaran Inspektori Wilayah V setelah diuangkan total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko kegiatan evaluasi SPP/Reviu KLIIP dan Kegiatan Pendampingan/Evaluasi perijam</p>	<p>0</p> <p>Triwulan I</p> <p>1. Telaah Sejawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI)</li> <li>Melaksanakan Rapat Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (ITWIL I, II, IV, V)</li> <li>Persiapan pelaksanaan Telaah Sejawat tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024</li> <li>Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2</li> <li>Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Telaah Sejawat</li> <li>Melaksanakan Penyusunan Konsep SP dan Proses SP</li> <li>Melaksanakan Penyusunan Permintaran Data Dokumen</li> <li>Pelaksanaan Telaah Sejawat (ITWIL I, IV, VI) di bulan Maret 2024</li> <li>Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Telaah Sejawat (ITWIL I, II, IV, V)</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program</p> <p>Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (Cat. Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Penetapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kemendukhamb</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ol> <p>4. Joint Audit Kinerja Kinerja Program Pengakng dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan SK Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran</li> </ol> <p>5. Reviu LK Semester II 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Menyelenggarakan Workshop</li> <li>Melaksanakan Reviu LK</li> <li>Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</li> </ol> <p>6. Reviu PAPBU dan PIDN TW1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBU dan PIDN TW1.</li> <li>Melaksanakan Reviu PAPBU dan PIDN TW1</li> <li>Menyusun CHR dan LHR.</li> </ol> <p>7. Reviu PKP LK Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBU dan PIDN TW1.</li> <li>Melaksanakan Reviu PAPBU dan PIDN TW1</li> <li>Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu.</li> </ol> <p>8. Audit Ketataan Bargas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan penetapan pemenuhan data dukung</li> <li>Pelaksanaan Audit</li> <li>Pelaporan Audit</li> </ol> <p>9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Tim Penilai Internal Inspektori Jenderal</li> <li>Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023</li> </ul> <p>10. Audit TK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Audit TK</li> <li>Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>Rapat Koordinasi dengan Inspektori Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK</li> <li>Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I</li> <li>Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN</li> <li>PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN</li> </ol> <p>11. Pengawasan CASN dan Catat Poltekik/Poltekim Tahun Anggaran 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan</li> <li>Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal</li> <li>Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektori Wilayah</li> <li>Pembentukan Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektori Jenderal</li> </ol> <p>12. Duta Integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring rencana aksi Duta Integritas</li> </ol> <p>13. Evaluasi Renstra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra</li> </ol> <p>14. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemendukhamb tahun 2024</p> <p>15. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>16. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektori Wilayah</p>	<p>Triwulan I</p> <p>1. Telaah Sejawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI)</li> <li>Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (Telaah Sejawat antara ITWIL I, II, dan VI)</li> <li>Nota Dinas dan Surat Perintah Telaah Sejawat tahun 2024 (Telaah Sejawat antara ITWIL II, IV, dan VI)</li> <li>Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2</li> <li>Program Kerja Telaah Sejawat</li> <li>Nota Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan Telaah Sejawat</li> <li>Surat Permintaran Data Dokumen</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program</p> <p>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Penetapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kemendukhamb</li> <li>Notuln Undangan Peserta Workshop RB;</li> <li>Daftar Hadir</li> <li>Notula dan Dokumentasi Foto</li> <li>Laporan Pelaksanaan Workshop RB;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ol> <p>Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</p> <p>Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</p> <p>Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03;</p> <p>Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03.</p> <p>4. Joint Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Notuln Undangan Rapat;</li> <li>Daftar Hadir</li> <li>Notula dan Dokumentasi</li> <li>SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dab Fungsi Pemasaran;</li> </ol> <p>5. Reviu LK Semester II 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen</li> <li>Laporan Kegiatan Workshop</li> <li>Dokumen reviu CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu</li> </ol> <p>6. Reviu PAPBU dan PIDN TW1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBU dan PIDN TW1.</li> <li>Dokumen hasil reviu berupa CHR dan LHR.</li> </ol> <p>7. Reviu PKP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBU dan PIDN TW1.</li> <li>Dokumen hasil reviu berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu.</li> </ol> <p>8. Audit Ketataan Bargas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Program Kerja Audit</li> <li>Surat Tugas Pelaksanaan Audit</li> <li>Dokumen Laporan Hasil Audit</li> </ol> <p>9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Tim Penilai Internal Inspektori Jenderal</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024.</li> </ol> <p>10. Audit TK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Audit TK</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektori Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TK</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I</li> <li>Notula dan Dokumentasi hasil Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait PKS Audit TK oleh BRIN dan BSSN</li> </ol> <p>11. Pengawasan CASN dan Catat Poltekik/Poltekim Tahun Anggaran 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Internal</li> <li>Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal</li> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektori Wilayah</li> <li>Surat Perintah Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektori Jenderal</li> </ol> <p>12. Duta Integritas</p> <p>Laporan Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>13. Evaluasi Renstra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Notulen rapat dan Surat Keputusan Tim Koordinator Reviu Renstra</li> <li>Notulen rapat persiapan Reviu Renstra</li> </ol> <p>14. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p> <p>15. Laporan Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory)</p> <p>16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektori Wilayah</p>	<p>Inspektori Wilayah V</p>
						<p>Triwulan II</p> <p>1. Telaah Sejawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI</li> <li>Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, II, IV</li> <li>Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektori Jenderal</li> <li>Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI)</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat persiapan Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</li> <li>Melaksanakan rapat persiapan workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (tentative/PNBP) (Cat. Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</li> </ol> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> <li>Pelaksanaan Monitoring (Pengantar/Astensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</li> <li>Penyusunan Draft Peraturan Inspektori Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol> <p>4. Joint Audit Kinerja Layanan Pemasaran</p> <p>Pelaksanaan Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaran</p> <p>5. Reviu RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</li> <li>Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2025</li> <li>Menyusun CHR dan LHR</li> </ol> <p>6. Reviu PAPBU dan PIDN TW2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PAPBU dan PIDN TW2.</li> </ol>	<p>Triwulan II</p> <p>1. Telaah Sejawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI</li> <li>Laporan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, II, IV</li> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektori Jenderal</li> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL 1 s.d. VI)</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program</p> <p>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI)</p> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06</li> <li>Undangan</li> <li>Absensi</li> <li>Notula dan Dokumentasi Foto</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ol> <p>Surat Perintah Nama Evaluator;</p> <p>Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</p> <p>Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</p> <p>Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06;</p> <p>Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06.</p> <p>4. Melakukan Monitoring (Pengantar/Astensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Undangan</p> <p>Absensi</p>		

6. Melaksanakan Revisi PABJ dan PSDN TW2  
 c. Menyusun CHR dan LHR.

7. Evaluasi WBK / WBMM

8. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2023  
 - Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
 - Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
 - Panel TPI  
 b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2023  
 - Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal  
 - Penginputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Merpan RB

9. Audit TIK  
 Pelaksanaan Audit TIK Aplikasi dan Infrastruktur  
 a. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  
 Pelaksanaan Audit

10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Potekim Tahun Anggaran 2024  
 a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS  
 - Pengawasan Tahap Perencanaan  
 - Pengawasan Pengabdian CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran  
 - Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi  
 - Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar  
 - Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang  
 - Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir  
 - Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS  
 b. Pelaksanaan Pengawasan PKK  
 - Pengawasan Tahap Perencanaan  
 - Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran  
 - Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi  
 - Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara  
 - Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan  
 - Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi  
 - Pengangkatan Tahap PKK  
 c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Potekim  
 - Pengawasan Tahap Pribates  
 - Pengawasan Tahap SKD  
 - Pengawasan Tahap Kesehatan  
 - Pengawasan Tahap Kesempurnaan  
 - Pengawasan Tahap WPFK

11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal  
 - Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal

12. Audit PNPB  
 - Penyempurnaan perencanaan audit PNPB

13. Duta Integritas  
 a. Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas  
 b. Monitoring rencana aksi Duta Integritas

14. Evaluasi Renstra  
 a. Penyusunan PKE, KKE dan format LHE Renstra

15. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional  
 Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024

16. Audit Tujuan Tertentu (Pte Memory)

17. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian konsep pada Inspektorat Wilayah

6. Melaksanakan Revisi PABJ dan PSDN TW2  
 c. Menyusun CHR dan LHR.

7. Evaluasi WBK / WBMM

8. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2023  
 - Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
 - Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  
 - Panel TPI  
 b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2023  
 - Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal  
 - Penginputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Merpan RB

9. Audit TIK  
 Pelaksanaan Audit TIK Aplikasi dan Infrastruktur  
 a. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri  
 Pelaksanaan Audit

10. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Potekim Tahun Anggaran 2024  
 a. Pelaksanaan Pengawasan CPNS  
 - Laporan Pengawasan Pengabdian CPNS Tahap Pengumuman dan Lamaran  
 - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi  
 - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Dasar  
 - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang  
 - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Akhir  
 - Laporan Pengawasan Tahap Pengangkatan CPNS  
 b. Pelaksanaan Pengawasan PKK  
 - Laporan Pengawasan Tahap Perencanaan  
 - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman dan Lamaran  
 - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Administrasi  
 - Laporan Pengawasan Tahap Kompetensi dan Wawancara  
 - Laporan Pengawasan Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan  
 - Laporan Pengawasan Tahap Pengumuman Hasil Seleksi  
 - Laporan Pengangkatan Tahap PKK  
 c. Pelaksanaan Pengawasan Catur Poltekip/Potekim  
 - Laporan Pengawasan Tahap Pribates  
 - Laporan Pengawasan Tahap SKD  
 - Laporan Pengawasan Tahap Kesehatan  
 - Laporan Pengawasan Tahap Kesempurnaan  
 - Laporan Pengawasan Tahap WPFK

11. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal  
 - Laporan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal

12. Audit PNPB  
 a. Hasil Rapor persiapan perencanaan audit PNPB  
 b. Notulen hasil rapat

13. Duta Integritas  
 a. Draft Revisi Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas  
 b. Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas

14. Evaluasi Renstra  
 a. Notulen rapat serta konsep PKE, KKE dan LHE Renstra

15. Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemenkumham tahun 2024

16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP terkait efektifitas pengendalian konsep pada Inspektorat Wilayah

	<p>4. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - SK Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - Draft Peraturan Ijen tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>
<p>4. Joint Audit        - Sampling        a. Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit        b. Surat Perintah Pengujian KKA dan PKA        c. Laporan Hasil Pengujian KKA dan PKA</p> <p>5. Revisi RKAAL Pagu Indikatif Tahun 2025        a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAAL Pagu Indikatif Tahun 2025        b. Dokumen hasil CHR dan LHR</p>	<p>4. Joint Audit        - Sampling        a. Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit        b. Surat Perintah Pengujian KKA dan PKA        c. Laporan Hasil Pengujian KKA dan PKA</p> <p>5. Revisi RKAAL Pagu Indikatif Tahun 2025        a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi RKAAL Pagu Indikatif Tahun 2025        b. Dokumen hasil CHR dan LHR</p>
<p>6. Revisi PABJ dan PSDN TW2        a. Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revisi PABJ dan PSDN TW2.        b. Dokumen CHR dan LHR.</p> <p>7. Evaluasi WBK / WBMM        a. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2024        - Workshop persiapan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK / WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data didukung sebagai berikut:        1) Undangan        2) Absen        3) Notula        4) Dokumentasi        - Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan data didukung sebagai berikut:        1) Surat Perintah Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        2) BA Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        3) Laporan Evaluasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBMM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - Panel TPI, dengan data didukung sebagai berikut:        1) Surat Perintah Panel TPI        2) Laporan Panel TPI        3) Surat Informasi Hasil Panel ke Setjen        b. Pelaporan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBMM Tahun 2024        - Penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024 oleh TPI kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal, dengan data didukung sebagai berikut:        1) Surat Informasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2024        2) Surat Perintah Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBMM Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM        - Penginputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Aplikasi PMPZI Kementerian PAN dan RB serta Integrasi Data dengan PMPZI Merpan RB, dengan data didukung sebagai berikut:        1) Surat Perintah Penginputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM        2) Laporan Penginputan usulan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBMM</p>	<p>4. Penyusunan Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - SK Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - Draft Peraturan Ijen tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM        - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>

	<p><b>Triwulan III</b></p> <p>1. Telah Selesai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan studi banding ke K/L lain</li> <li>Menyampaikan laporan Telah Sejahter Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Workshop (tentative) PNPB</li> <li>Melaksanakan Penyusunan Program Kerja</li> <li>Melaksanakan Penyusunan Konsep Surat Perintah</li> <li>Melaksanakan Audit Program pada masing masing Unit Eselon I (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024)</li> </ol> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ol> <p>4. Revu LK Semester 1 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Menyenggarakan Workshop</li> <li>Melaksanakan Revu LK</li> <li>Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi</li> </ol> <p>5. Revu PABJ dan P3DN TW3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW3.</li> <li>Melaksanakan Revu PABJ dan P3DN TW3</li> <li>Menyusun CHR dan LHR</li> </ol> <p>6. Revu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</li> <li>Melaksanakan Revu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</li> <li>Menyusun CHR dan LHR</li> </ol> <p>7. Revu RK-BMN Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Melaksanakan Revu LK</li> <li>Menyusun CHR dan LHR</li> </ol> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>9. Audit TIK Pelaporan komplasi Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri Penyusunan laporan komplasi</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024 Penyusunan laporan Komplasi</p> <p>12. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal Melaksanakan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal</p> <p>13. Audit PNPB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat perencanaan audit PNPB;</li> <li>PKS audit PNPB;</li> <li>Pelaksanaan audit PNPB.</li> </ol> <p>14. Duta Integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring rencana aksi Duta Integritas</li> </ol> <p>15. Evaluasi Renstra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Renstra</li> </ol> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemerkumham tahun 2024</p> <p>17. Audit Tujuan Tertentu (Pre-Memory)</p> <p>18. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	<p><b>Triwulan III</b></p> <p>1. Telah Selesai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan ke K/L lain, laporan dan dokumentasi studi banding ke K/L lain</li> <li>Nota Dinas penyampaian Laporan Telah Sejahter Tahun 2024 sebagai data dukung Kapabilitas APJP ITJEN</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi, Materi, Roundup, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program pada Unit Eselon I, Laporan Kegiatan</li> <li>Program Kerja</li> <li>Surat Perintah</li> <li>LHA Program pada masing2 ITWIL (ITWIL 1 s.d. VI )</li> </ol> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B09</li> <li>Undangan</li> <li>Absensi</li> <li>Notula dan Dokumentasi Foto</li> </ol> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>-Notul Permintaan Nama Evaluator; -Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09; -Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09; -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09; -Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B09.</p> <p>4. Revu LK Semester 1 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LIANG terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Undangan</li> <li>Dokumen CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi</li> </ol> <p>5. Revu PABJ dan P3DN TW3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW3.</li> <li>Dokumen hasil berupa CHR dan LHR.</li> </ol> <p>6. Revu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2025</li> <li>Dokumen hasil berupa CHR dan LHR.</li> </ol> <p>7. Revu RK-BMN Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Dokumen CHR dan LHR</li> </ol> <p>8. Monitoring WBBM 2 Tahun</p> <p>-Surat Perintah Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun -BA Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun -Laporan Monev Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun -Surat Informasi ke Kewil Kementerian Hukum dan HAM yang Satuan Kerja Sudah Mendapatkan Predikat WBBM 2 Tahun -Laporan Komplasi ke Manpan terkait Satuan Kerja Yang dilakukan Monev Sudah Mendapatkan Predikat 2 Tahun</p> <p>9. Audit TIK Laporan Komplasi Pelaksanaan Audit TIK</p> <p>10. Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri Laporan komplasi pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri</p> <p>11. Pengawasan CASN dan Catur Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2024 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan CASN yang diujikan ke Mentent Hukum dan HAM</p> <p>13. Audit PNPB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil rapat perencanaan audit PNPB</li> <li>Laporan hasil PKS Audit PNPB</li> <li>RA Audit PNPB, laporan hasil Audit PNPB pada tingkat satker</li> </ol> <p>14. Duta Integritas Laporan Hasil Monitoring rencana aksi Duta Integritas</p> <p>15. Evaluasi Renstra Laporan Hasil Evaluasi Renstra</p> <p>16. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Laporan Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kemerkumham tahun 2024</p> <p>17. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Pre-Memory)</p> <p>18. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah</p>	
	<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telah Selesai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Penyusunan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat penyusunan komplasi Laporan Hasil Audit Program</li> <li>Membuat Laporan Hasil Audit Kinerja Program (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025)</li> </ol> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> <li>Melakukan Monitoring (Pegustan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</li> </ol> <p>4. Revu PABJ dan P3DN TW4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu PABJ dan P3DN TW4.</li> <li>Melaksanakan Revu PABJ dan P3DN TW4</li> <li>Menyusun CHR dan LHR</li> </ol> <p>5. Revu LK TW3 TA 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Revu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian.</li> <li>Melaksanakan Revu LK</li> <li>Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direvisi</li> </ol> <p>6. Revu RKAKL Pagu Alokasi Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Revu RKAKL Pagu Alokasi Tahun 2025</li> </ol>	<p><b>Triwulan IV</b></p> <p>1. Telah Selesai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Notula, Absensi, Dokumentasi rapat persiapan penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Undangan, Absensi, dan Draft Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol> <p>2. Audit Kinerja Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi Rapat penyusunan komplasi laporan antar koordinator Audit Program (ITWIL 1 s.d. VI)</li> <li>LHA Program (komplasi )</li> </ol> <p>3. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B12</li> <li>Undangan</li> <li>Absensi</li> <li>Notula dan Dokumentasi Foto</li> </ol> <p>b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <p>-Notul Permintaan Nama Evaluator; -Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12; -Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12; -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12; -Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B12.</p> <p>c. Melakukan Monitoring (Pegustan/Asistensi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>- Undangan</p>	



RENCANA AKSI PERCEPATAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN				PAGU (dalam ribuan rupiah)			RENCANA AKSI			KETERANGAN	
	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	PERHITUNGAN (MANUAL IKU)	DASAR BUKTI / PEMENUHAN	JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG DALAM RKAKL	PAGU	REALISASI (disi oleh 2024 dan sekret per triwulan)	KEGIATAN RENCANA AKSI	DATA DUKUNG		STATUS PELAKSANAAN (proses/selesai)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL</b>												
1	SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Internal Pemerintah (Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal)	<p>ISP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal KemerkumHAM</p> <p>ISP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPJP</p> <p>ISP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko</p> <p>ISP WA 5.4 Indeks Efektivitas Penendalian Korupsi</p> <p>ISP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APJP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	20	Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan PermennPANRB Nomor 88 Tahun 2021	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	1,194,471,000	0	tidak perlu diisi karena diturunkan ke kegiatan Itwil dan Sekretariat Itjen			
			0.802	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPJP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	691,595,000	0				
			3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPJP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	1,178,357,000	0				
			3.0	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.	Surat hasil evaluasi SPJP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI	21,967,347,000	0				
			3.1	Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021	Surat hasil evaluasi KAPJP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	Pengawasan Kinerja Inspektur Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Dukungan Manajemen dan Teknis ITJEN	1,568,485,600	0				
<b>KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH VI</b>												
1	SP WA.5 SK 1568.1 Terevisuinya Penyelenggaraan SPJP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektur Wilayah VI	ISK 1568.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal KemerkumHAM sesuai kewenangan Inspektur Wilayah VI	90%	(Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti <b>DIBAGI</b> Jumlah Renaksi RB terkait evaluasi AKIP <b>DIKALI</b> 100%)	Laporan hasil evaluasi SAKIP KemerkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.	1. Evaluasi AKIP 2. Revisi LKJP 3. Pendampingan (undangan dari Biro Perencanaan) 4. Pemantauan Tindaklanjuti 5. Workshop FGD terkait AKIP	113,802,000	0	<p>Alokasi dari anggaran kegiatan evaluasi AKIP dan Revisi LKJP pada Inspektur Wilayah VI</p> <p>Triwulan I: 1. Penetapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKJ; 2. - Workshop Revisi LKJ - Workshop Evaluasi SAKIP; 3. Revisi LKJ TK RL 4. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan I</p> <p>Triwulan II: 1. Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan II; 3. Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil</p> <p>Triwulan III: 1. Monitoring Hasil Revisi LKJ Kementerian 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan III</p> <p>Triwulan IV: 1. Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan IV 2. Revisi LKJ TK Karwil Tahun 2024</p>	<p>Triwulan I: 1. Notulen Rapat Internal persiapan Evaluasi SAKIP dan Revisi LKJ; 2. - Laporan Hasil Workshop Revisi LKJP; - Laporan Hasil Workshop Evaluasi AKIP; 3. Laporan Hasil Revisi LKJP TK RL 4. Laporan Monitoring hasil evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan I</p> <p>Triwulan II: 1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Eselon I; 2. Laporan Hasil Monitoring Hasil Evaluasi Triwulan II; 3. Laporan Hasil Revisi Hasil Evaluasi Mandiri Karwil.</p> <p>Triwulan III: 1. Laporan Monitoring Tindak lanjut Hasil Revisi LKJ Kementerian. 2. Laporan Monitoring Hasil Evaluasi AKIP Menpan dan APJP Triwulan III</p> <p>Triwulan IV: 1. Laporan Hasil Monitoring atas hasil Evaluasi AKIP Triwulan IV 2. Laporan Revisi LKJ TK Karwil tahun 2024</p>		Inspektur Wilayah VI
			90%	(Jumlah Renaksi SPJP terkait peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah VI	Surat hasil evaluasi SPJP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pendampingan Pengutan SPJP 2. Penjaminan Kualitas Maturitas SPJP 3. Pemantauan Tindaklanjuti 4. Workshop FGD terkait SPJP (Strukpro)	47,370,000	0	<p>Alokasi dari anggaran kegiatan Penyelenggaraan/Evaluasi/penjaminan kualitas spj pada Inspektur Wilayah VI</p> <p>Triwulan I: 1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPJP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Monitoring Hasil Evaluasi SPJP Terikat Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan I). 3. Pemantauan Tindaklanjuti 4. Workshop FGD terkait SPJP (Strukpro)</p> <p>Triwulan II: 1. Penyusunan pedoman Penjaminan Kualitas SPJP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Penetapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPJP 2024; 3. Monitoring Hasil Evaluasi SPJP Terikat Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan II); 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPJP 2024; 5. FGD Penjaminan Kualitas SPJP KemerkumHAM Tahun 2024.</p> <p>Triwulan III: Monitoring Hasil Evaluasi SPJP Terikat Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan III);</p> <p>Triwulan IV: 1. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP atas Notisi Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2024; 2. Melaksanakan Monitoring Hasil Evaluasi SPJP Terikat Struktur dan Proses Tahun 2022 dan 2023 (Triwulan IV); 3. Melaksanakan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2022 dan 2023 serta Notisi Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2024.</p>	<p>Triwulan I: 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hal Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPJP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Undangan dan notula rapat pembahasan Areas of Improvement hasil evaluasi maturitas SPJP terintegrasi tahun 2023 bersama BPKP;</p> <p>Triwulan II: 1. Draft Pedoman Penjaminan Kualitas SPJP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Laporan pelaksanaan penyusunan Pedoman Penjaminan Kualitas SPJP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kertas Kerja dan Format Berita Acara Penjaminan Kualitas SPJP 2024; 4. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPJP Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan II); 5. Undangan dan Notula Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPJP 2024; 6. Surat Perintah, Kertas Kerja, Laporan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan telah Dilakukan Penjaminan Kualitas SPJP KemerkumHAM Tahun 2024.</p> <p>Triwulan III: Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPJP Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan III);</p> <p>Triwulan IV: 1. Notula rapat koordinasi dengan BPKP atas Notisi Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2024; 2. Laporan hasil pemantauan atas Tindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian BPKP terkait SPJP Terintegrasi KemerkumHAM (Triwulan IV); 3. Surat Perintah, Berita Acara dan Laporan kegiatan Konsinyering Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2022 dan 2023; 4. Berita Acara Pembahasan Notisi Hasil Evaluasi SPJP Tahun 2024.</p>		Inspektur Wilayah VI
			90%	(Jumlah Renaksi SPJP terkait peningkatan maturitas penyelenggaraan SPJP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektur Wilayah VI	Surat hasil evaluasi SPJP Terintegrasi KemerkumHAM yang diterbitkan oleh BPKP	1. Pemantauan Tindaklanjuti 2. Workshop/ FGD terkait SPJP (MR) 3. Pendampingan Penyusunan/ Penetapan Manajemen Risiko 4. Evaluasi Manajemen Risiko	92,948,000	0	<p>Alokasi dari anggaran kegiatan Tindaklanjuti/Pendampingan/Evaluasi/ Manajemen Risiko pada Inspektur Wilayah VI</p> <p>Triwulan I: - Rapat masukan saran atas Rancangan Permenkumham tentang MR yang disampaikan Sekretariat Jenderal; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I). 3. Pendampingan Penyusunan/ Penetapan Manajemen Risiko</p> <p>Triwulan II: - Rapat Pelaksanaan Evaluasi; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).</p> <p>Triwulan III: - Evaluasi Penerapan MR; - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III)</p> <p>Triwulan IV: - Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; (TWIL III) - Monitoring Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).</p>	<p>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan I).</p> <p>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Dokumentasi; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan II).</p> <p>1. Surat Perintah dan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan III);</p> <p>1. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024; 2. Laporan Monitoring terkait Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPJP Terintegrasi berkaitan dengan manajemen risiko pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Triwulan IV).</p>		Inspektur Wilayah VI

<p>ISK 1568.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektora Wilayah VI</p>	<p>90%</p>	<p>(Jumlah Renaksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi yang diterbitkan) <b>DIBAGI</b> Jumlah peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektora Wilayah VI</p>	<p>Surat hasil evaluasi SPP Terintegrasi Kemitraan yang diterbitkan oleh BPKP</p>	<p>1. Kegiatan Audit 2. Kegiatan Reviu (kecuali Reviu LK/PI) 3. Kegiatan Evaluasi (kecuali Evaluasi AKIP dan PK SPP) 4. Pengawasan Lainnya</p>	<p>4,751,175,000</p>	<p>Akses dari seluruh anggaran Inspektora Wilayah VI setelah dikurangi total alokasi untuk kegiatan Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko, kegiatan evaluasi SAMP/Reviu LK/PI dan Kegiatan Pendampingan Evaluasi perjem</p>	<p>0. Triwulan I 1. Telaah Sejawat: a. Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan Rapat Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (ITWIL I, III, V) c. Persiapan pelaksanaan Telaah Sejawat tahun 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024 d. Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2 e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Telaah Sejawat f. Melaksanakan Penyusunan Koneksi SP dan Proses SP g. Melaksanakan Penyusunan Pemantauan Datal Dokumentasi h. Pelaksanaan Telaah Sejawat (ITWIL II, IV, VI) di bulan Maret 2024 i. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Telaah Sejawat (ITWIL I, III, V) 2. Audit Kinerja Program: Melaksanakan Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kementerian b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi 4. Joint Audit Kinerja Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakan - Penyusunan SK Tim Kerja serta Konsep PKA dan Kertas Kerja Joint Audit Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakan 5. Reviu LK Semester II 2023 a. Koordinasi dengan Sekjen terkait timeline pelaksanaan Reviu LK Tingkat Eselon I dan Kementerian. b. Menyelenggarakan Workshop c. Melaksanakan Reviu LK d. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu 6. Reviu PABJ dan P3DN TW1 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW1 c. Menyusun CHR dan LHR. 7. Reviu PKP LK Tahun 2023 a. Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Melaksanakan Reviu PABJ dan P3DN TW1 c. Menyusun CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu. 8. Audit Ketataan Berjas a. Perencanaan dan persiapan pemenuhan data dukung b. Pelaksanaan Audit c. Pelaporan Audit 9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 dan WBBM Tahun 2023 - Pembentukan Tim Penilai Internal Inspektora Jenderal - Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 10. Audit TIK a. Perencanaan Audit TIK - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Inspektora Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TIK - Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I - Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN - PKS Audit TIK oleh BRIN dan BSSN 11. Pengawasan CASN dan Catur Polekpi/Poltekim Tahun Anggaran 2024 a. Perencanaan - Rapat Koordinasi Tim Internal - Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektora Wilayah - Pembentukan Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektora Jenderal 12. Duta Integritas a. Monitoring rencana aksi Duta Integritas 13. Evaluasi Renstra a. Pembentukan Tim Koordinator Evaluasi Renstra b. Persiapan Evaluasi Renstra 14. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi capaian Program Prioritas Nasional Kementerian tahun 2024 15. Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory) 16. Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektora Wilayah</p>	<p>Triwulan I 1. Telaah Sejawat: a. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Telaah Sejawat (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Telaah Sejawat tahun 2023 (Telaah Sejawat antara ITWIL I, III, dan V) c. Nota Diras dan Surat Perintah Telaah Sejawat tahun 2024 (Telaah Sejawat antara ITWIL II, IV, dan VI) d. Undangan, Absensi, Nota, dan Dokumentasi Rapat Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal ke-2 e. Program Kerja Telaah Sejawat f. Nota Diras dan Surat Perintah Pelaksanaan Telaah Sejawat g. Surat Permintaan Datal/Dokumen 2. Audit Kinerja Program: Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) 3. Reformasi Birokrasi a. Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Monev RKT RB per triwulan Kementerian - Nodin Undangan Peserta Workshop RB; - Datal Hadir; - Nota dan Dokumentasi Foto; - Laporan Pelaksanaan Workshop RB; b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03; - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B03. 4. Joint Audit a. Nodin Undangan Rapat; b. Datal Hadir; c. Nota dan Dokumentasi Foto; d. SK Tim Kerja Joint Audit Tugas dan Fungsi Pemasaryakan; 5. Reviu LK Semester II 2023 a. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Sekjen b. Laporan Kegiatan Workshop c. Dokumen hasil reviu berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu 6. Reviu PABJ dan P3DN TW1 a. Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait kegiatan Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Dokumen hasil reviu berupa CHR dan LHR. 7. Reviu PKP a. Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait Koordinasi dengan Mitra Unit Eselon I terkait timeline pelaksanaan Reviu PABJ dan P3DN TW1. b. Dokumen hasil reviu berupa CHR, LHR dan Pernyataan Telah Direviu. 8. Audit Ketataan Berjas a. Dokumen Program Kerja Audit b. Surat Tugas Pelaksanaan Audit c. Dokumen Laporan Hasil Audit 9. Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024 - SK Tim Penilai Internal Inspektora Jenderal - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait Forum Grup Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024. 10. Audit TIK a. Perencanaan Audit TIK - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi Tim Internal - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait Rapat Koordinasi dengan Inspektora Wilayah dan Bagian tentang Pelaksanaan Audit TIK - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait Rapat Pembahasan Penentuan Objek Audit antara Ijen, Pusdatin dan Seluruh Unit Eselon I - Nota dan Dokumentasi hasil Koordinasi SPBE dengan BRIN dan BSSN - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi terkait PKS Audit TIK oleh BRIN dan BSSN 11. Pengawasan CASN dan Catur Polekpi/Poltekim Tahun Anggaran 2024 a. Perencanaan - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Internal - Nota dan Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal - Undangan, Absensi, Nota dan Dokumentasi Rapat Koordinasi seluruh tim Perwakilan Inspektora Wilayah - Surat Perintah Tim Pengawas CASN Tahun 2024 Inspektora Jenderal 12. Duta Integritas Laporan Monitoring rencana aksi Duta Integritas 13. Evaluasi Renstra a. Nodin rapat dan Surat Keputusan Tim Koordinator Reviu Renstra b. Nodin rapat persiapan Reviu Renstra 14. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional 15. Laporan Audit Tujuan Tertentu (Pre Memory) 16. Laporan Monitoring atas Pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektora Wilayah</p>	<p>Inspektora Wilayah VI</p>
							<p>Triwulan II 1. Telaah Sejawat: a. Penyusunan Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Melaksanakan workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektora Jenderal d. Melaksanakan rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI) 2. Audit Kinerja Program: a. Melaksanakan rapat persiapan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) b. Melaksanakan rapat persiapan workshop dengan tema Pelaksanaan Audit Program (ITWIL I s.d. VI) (tentative/PSPP) (Cat: Audit Kinerja Program Prioritas Nasional tahun 2024 baru dapat dilakukan audit pada Januari 2025 dan objek yang sama juga dilakukan evaluasi capaian Prioritas Nasional di tahun 2024) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistansi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis d. Penyusunan Draft Peraturan Inspektora Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Joint Audit Kinerja Layanan Pemasaryakan Pelaksanaan Joint Audit Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasaryakan</p>	<p>Triwulan II 1. Telaah Sejawat: a. Laporan Telaah Sejawat Tahun 2024 oleh ITWIL II, IV, VI b. Laporan Tindak Lanjut Telaah Sejawat Tahun 2023 oleh ITWIL I, III, V c. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi, Materi, Rundown, SK Narasumber workshop dengan tema Pelaksanaan Telaah Sejawat di lingkungan Inspektora Jenderal d. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi rapat persiapan studi banding ke K/L lain (ITWIL I s.d. VI) 2. Audit Kinerja Program: a. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) b. Undangan, Absensi, Nota, Dokumentasi Rapat persiapan antar koordinator Audit Program (ITWIL I s.d. VI) 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring RKT RB B06 - Undangan - Absensi - Nota dan Dokumentasi Foto b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06 dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi - Nodin Permintaan Nama Evaluator; - Surat Perintah Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Berita Acara Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06; - Informasi Hasil Informasi Monitoring dan Evaluasi RKT RB B06. c. Melakukan Monitoring (Penguatan/Asistansi) Pelaksanaan RKT RB pada Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis</p>	







